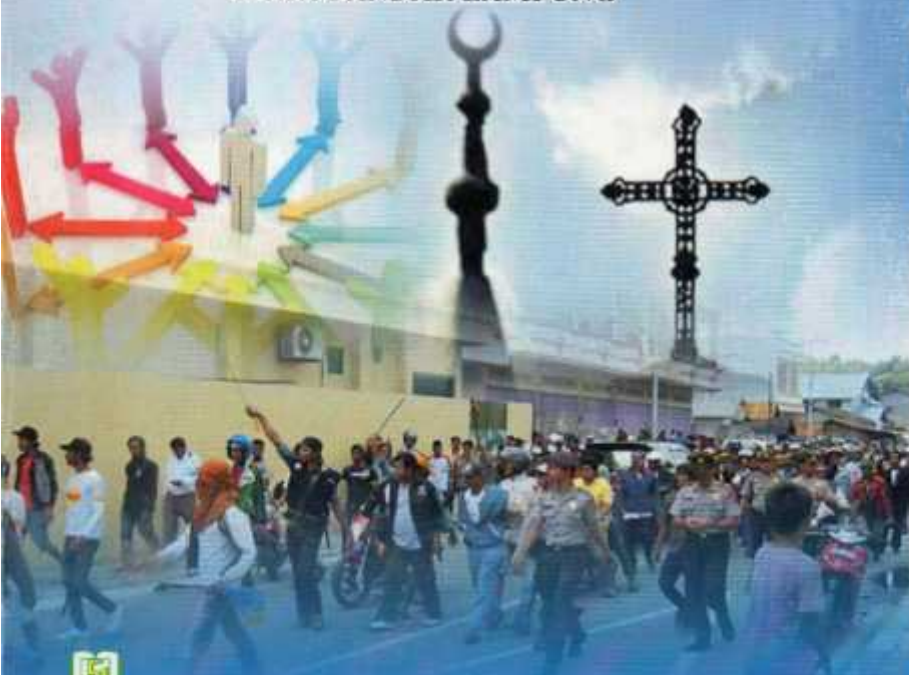


Sri Ilham Nasution

# KONFLIK DAN INTEGRASI

STUDI KASUS POLA INTERAKSI SOSIAL  
KELOMPOK KEAGAMAAN ISLAM DAN KRISTEN  
DI KELURAHAN SAWAH BREBES  
KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR  
KOTA BANDAR LAMPUNG



Alfabeta  
Publishing

KONFLIK DAN INTEGRASI  
Studi Kasus Pola Interaksi Sosial  
Kelompok Keagamaan Islam dan Kristen  
di Kelurahan Sawah Brebes  
Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandarlampung



*Disusun oleh:*  
Sri Ilham Nasution

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUKASI  
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

2014

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah swt, atas rahmat dan karuniNya penelitian tentang Konflik dan Interaksi social Studi Kasus Pola Interaksi Sosial Kelompok Keagamaan Islam dan Kristen di Kelurahan Sawah Brebes Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandarlampung, telah di selesaikan sesuai dengan harapan.

Penelitian ini diarahkan guna mencari informasi yang factual tentang Konflik dan Interaksi social Studi Kasus Pola Interaksi Sosial Kelompok Keagamaan Islam dan Kristen di Kelurahan Sawah Brebes Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandarlampung, secara faktual di lapangan diperoleh gambaran tentang konflik dan Integrasi social dalam kehidupan sehari-hari.

Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah lampung, selain itu sebagai penambah khasanah pengembangan pengetahuan dalam membina dan menumbuh kembangkan pemahaman tentang kehidupan social dan beragama khususnya di daerah kelurahan Sawah Brebes.

Dengan menyadari keterbatasan yang ada pada diri peneliti, kiranya saran dan masukan sangat diperlukan dalam penyempurnaan hasil yang lebih baik.

Peneliti, 2014

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Balakang Masalah	2
B. Rumusan dan Batasan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORITIS	13
A. Kajian Konseptual	13
1. Masyarakat Majemuk	13
2. Konflik social	15
a. Bentuk-Bentuk Konflik	27
b. Faktor-faktor yang Mendorong Terjadinya Konflik	32
3. Integrasi soaial	36
a. Proses Integrasi Sosial	46
b. Faktor-faktor Penghalang Integrasi Social	51
c. Faktor-faktor Pendorong Integrasi Sosial	58
B. Kajian Relevan	67

C. Kerangka Pemikiran	70
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	75
A. Latar, Entri Dan Kehadiran Penelitian	75
1. Latar Penelitian	75
2. Entri Penelitian	76
B. Alasan Penggunaan Metode Kualitatif	77
C. Metode Pengumpulan Data	78
D. Informan	78
E. Tehnik Analisis Data	80
F. Tehnik Penjaminan Keabsahan Data	82
BAB IV TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN	84
A. Kondisi Umum Sawah Brebes	84
1. Asal-Usul Sawah Brebes	84
2. Letak, Luas dan Jumlah Penduduk	85
3. Mata Pencarian, Agama, dan Pendidikan	86
a. Mata Pencarian	86
b. Agama	88
c. Pendidikan	88
4. Bahasa dan Budaya	91
5. Sarana Pendukung	92

B. Bentuk-Bentuk Konflik	92
a. Konflik Kelompok	92
b. Konflik Realistik	97
C. Bentuk-Bentuk Integrasi Sosial	100
a. Gotong-royong	100
b. Saling Hormat-menghormati	102
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105

## DAFTAR PUSTAKA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kajian tentang Kehidupan sosial dan keagamaan kontemporer masih sangat sedikit dilakukan. Keanekaragaman agama dan faham dalam agama di Indonesia, seperti juga halnya keaneka-ragaman suku bangsa, merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Keanekaragaman tersebut berimplikasi pada ter-ciptanya perbedaan dan batas-batas golongan sosial yang tidak jarang menimbulkan ketegangan sosial, apalagi bila mendapat pengaruh dari berbagai faktor yang mempertajam dan memper-tegas batas-batas golongan sosial tersebut.

Konsep perbedaan dan pertentangan golongan sosial, batas-batas golongan sosial, dan struktur sosial yang bersifat memecah belah dan sekaligus juga mendorong terwujudnya integrasi dari dua polarisasi tersebut telah membentuk dua persepsi sosiologi. Pertama, mempertajam batas-batas golongan sosial dalam

kemajemukan struktur sosial yang akan menciptakan terjadinya konflik sosial. Kedua, melonggarkan batas-batas sosial dan berusaha hadir dalam struktur sosial yang lebih makro mengakomodasi kepentingan kolektif struktur sosial yang berbeda akan menciptakan terjadinya interaksi sosial.

Syafuddin (1986) mengatakan keanekaragaman agama seperti juga halnya keanekaragaman suku bangsa akan berimplikasi kepada perbedaan-perbedaan dan batas-batas golongan sosial yang tak jarang bisa menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial, apabila ada faktor-faktor tertentu yang mempertajam perbedaan dan mempertegas batas-batas golongan sosial tersebut. Selanjutnya dalam buku *Ethnic Groups and Boundaries*, Frederik Barth (1988) mengemukakan agar tercipta integrasi sosial, harus tercipta sejumlah pranata yang mengikat semua golongan sosial sehingga setiap warga dapat mengidentifikasi diri pada suatu ciri yang juga dimiliki oleh warga golongan sosial yang lain, seperti nilai-nilai nasionalisme yang mampu merangkul harapan jutaan rakyat Indonesia dengan berbagai macam latar belakang



etnis, agama, adat istiadat dan budaya untuk terlepas dari belenggu penjajahan asing dan mengikat persatuan.

Fakta menunjukkan kepluralitas masyarakat Indonesia (suku , agama dan golongan sosial lainnya) sudah merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Kepluralitasan itu sudah menjadi hukum alam (*natural law*) menurut para penganut positivisme dan hukum Tuhan (*sunnatullah*) dalam paradigma agamawan. Paradigma apapun yang ditengahkan, yang pasti dibalik deferensiasi masyarakat Indonesia itu mengendap keragaman kebudayaan, karena sistem nilai budaya yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok akan terwujud dalam bentuk-bentuk perilaku yang terpola (*pattern of social behaviour*).

Agama sebagai salah satu elemen dari kemajemukan bangsa ini menurut Durkheim (Dalam Johnson, 1986:76) merupakan suatu fakta sosial, karena agama mempunyai seperangkat sistem nilai budaya keagamaan yang berfungsi sebagai acuan norma sosial dalam pola perilaku penganutnya. Perasaan kolektif oleh sistem nilai budaya keagamaan telah memunculkan identitas kolektif

pemeluk suatu agama budaya dalam realitas sosial. Walau bagaimanapun dari lima agama formal yang diakui keberadaannya oleh pemerintah Indonesia telah ikut mewarnai pola perilaku masyarakat Indonesia yang terdeferensiasi oleh berbagai sistem nilai budaya keagamaan yang melatarbelakangi perilaku tersebut. Problematika sosial muncul kepermukaan, manakala masing-masing kelompok keragaman tersebut melakukan truth claim (klaim kebenaran) terhadap sistem nilai budaya keagamaan mereka masing-masing sebagai referensi sosial, untuk memahami dan menghadapi lingkungan sosialnya.

Auguste Comte (Dalam Soleman b. oneko, 1990:7) sebagai lokomotif sebagai lokomotif sosiologi dalam pembelaannya terhadap kemestian kehidupan kolektif bagi manusia mengemukakan, naluri untuk hidup bersama itu sudah dimiliki manusia, inilah yang diistilahkan dengan gregarious instinct, lebih tajam lagi Selo Soemardjon (1988:3) mengatakan interaksi sosial yang merupakan prasyarat esensial bagi kehidupan serta mengembangkan potensi spiritual dan intelektual manusia. Karena dengan kehidupan bersama dapat saling belajar, saling meniru,

saling isi mengisi dan saling kembang-mengembangkan pengertian dan kemampuannya di bidang spiritual dan intelektual.

Tuhuleley (1993) dalam sebuah pengantar penyunting sebuah buku yang berjudul: Permasalahan abad XXI sebuah agenda dengan mengutip pendapat Ibnu khaldun dalam sebuah karyanya yang sangat terkenal muqaddimah mengemukakan kehidupan bersama manusia yang terefleksi lewat organisasi sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya untuk mempertahankan kelangsungan hidup (survive of life) merupakan indikasi terhadap keterbatasan kehidupan individual.

Dalam proses interaksi sosial, antara orang perorangan, peorangan dengan kelompok, kelompok dengan kelompok mempertegas garis batas diantara kelompok sosial yang menguatkan identitas kelompok yang berimplikasi kepada perjuangan kepentingan kelompok dengan cara menepis kepentingan kelompok lain seringkali menjadi pemicu terjadinya konflik sosial. Karena dalam pola interaksi seperti itu sebagaimana yang dikatakan oleh Ian Craib (1994:104), faktor

kepentingan termasuk didalamnya kepentingan kelompok mengatasi konsesus sosial yang diatur oleh norma sosial. Pola interaksi sosial dalam terminologi sosiologi antropologi diistilahkan dengan interaksi sosial dissosiatif (konflik). Pada sisi lain proses interaksi sosial yang terjadi dengan cara memperlonggar batas-batas kelompok sosial mengutamakan persamaan dan saling ketergantungan diantara kelompok dalam struktur yang lebih makro, mematuhi konsesus sosial yang merupakan refleksi dari norma-norma sosial akan menciptakan terjadinya interaksi sosial. Karena dalam pola interaksi semacam ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Mannheim, Berry dan Durkheim (1995:99;1981,X;1986:181) faktor konsesus yang didasarkan pada norma-norma sosial mengatasi faktor-faktor kepentingan termasuk juga kepentingan kelompok. Lebih tegas lagi Durkheim mengatakan: Norma-norma sosial itu adalah sesuatu yang berada diluar individu. Membatasi mereka dengan mengadili tingkah laku mereka. (Taneko,1990:67) Oleh karena itu pola durkheim mengatakan fakta sosial itu tidak bisa direduksi ke individu, karena fakta sosial itu tercipta bukan karena kepentingan individu tetapi atas dasar

kepentingan sosial. Pola semacam ini disebut dengan pola interaksi sosial Assosiatif (integrasi).

Dalam proses sosial konflik dan integrasi sudah merupakan hukum alam (natural law), tidak salah kiranya jika Dahrendorf, seorang tokoh yang menelaah aliran fungsional struktural menyangsikan bahwa kita tidak akan dapat memahami semua masalah realitas sosial, karena sisi yang dilihat barulah sebagian dari realitas sosial itu. Masyarakat menurut Dahrendorf bermuka dua; integrasi dan nilai-nilai versus penggunaan kekerasan dan kepentingan-kepentingan. (Dahrendorf 1986:191)

Dari statmen dapat dipahami bahwa konflik sosial itu adalah sebuah perjuangan terhadap nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan terhadap status kekuasaan dan kelangkaan sumber daya ,dimana tujuan dari konflik kelompok tidak hanya untuk memperoleh nilai-nilai yang diinginkan tetapi jika untuk menetralkan, melukai dan menyenyapkan lawan-lawan mereka. Konflik bisa terjadi antara individu dengan individu lainnya, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Konflik intra

dan inter group sudah inheren dalam kehidupan sosial. Sedangkan integrasi sosial dimaksudkan sebagai penyatuan kelompok-kelompok yang tadinya terpisah satu sama lain dengan melenyapkan perbedaan – perbedaan sosial dan kebudayaan yang ada sebelumnya. Integrasi sosial juga diartikan sebagai diterimanya seorang individu oleh anggota-anggota lain dari suatu kelompok. (Syarifuddin,1986:7)

Berdasarkan latarbelakang pemikiran di atas, penulis bermaksud menganalisa dan memahami bagaimana perbedaan nilai-nilai agama (Islam dan Kristen) diakomodasi oleh pemeluknya sebagai referensi sosial yang menguatkan batas-batas golongan sosial sehingga tercipta konflik sosial dan bagaimana masing-masing pemeluk agama tersebut (Islam dan Kristen) melongarkan perbedaan nilai-nilai agama mereka dan berusaha berintegrasi dalam struktur sosial yang lebih makro (Struktur sosial masyarakat kelurahan Sawah Brebes Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandarlampung). Sehingga tercipta integrasi sosial di kelurahan Sawah Brebes Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandarlampung.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan (grand taour) penulis di kelurahan Sawah Brebes Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandarlampung terhadap dua kelompok keagamaan (Islam dan Kristen) ditemukan berbagai masalah dalam pola integrasi sosial, antara lain sebagai berikut:

Perbedaan agama yang mereka miliki (kelompok keagamaan Islam dan Kristen) tidak menjadi penghalang bagi mereka dalam melaksanakan interaksi yang bersifat assosiatif sebagai basis kerja sama (cooperation) untuk mewujudkan masyarakat yang terintegrasi. Mereka tidak mencampuradukan urusan spritual dan seremonial keagamaan dengan problematika sosial. Mereka selalu bekerjasama dalam hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan bersama, seperti gotoro bersama dalam rangka kebersihan lingkungan. Baik pada tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) maupun kelurahan. Kemudian mereka bersama-sama memeriahkan hari-hari besar yang bersifat nasional seperti perayaan tujuh belas Agustus, mereka melaksanakan transaksi jual beli, dan hubungan-hubungan sosial lainnya. Dengan kata lain perbedaan mereka dalam struktur sosial mikro (kelompok keagamaan masing-masing) libur manakala

mereka berada secara bersama-sama dalam sebuah struktur sosial yang lebih makro (Struktur sosial sesama warga Kelurahan Sawah Brebes Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandarlampung yang bisa mengikat struktur sosial yang berbeda tersebut.

## B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan atas pengetahuan yang diperoleh dari hasil temuan awal diatas, maka fokus penelitian adalah berusaha mengungkapkan, bagaimana cara kelompok keagamaan Islam dan kristen menciptakan konflik sosial di Sawah Brebes Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandarlampung. Bagaimana caranya kelompok keagamaan Islam dan Kristen menciptakan integrasi sosial di Kelurahan Sawah Brebes Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandarlampung. Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya konflik sosial anara kelompok keagamaan Islam dan Kristen di kelurahan Sawah Brebes Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandarlampung. Bagaimana caranya kelompok keagamaan Islam dan Kristen meredam terjadinya konflik sosial di kelurahan Sawah Brebes Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandarlampung.



Bagaimana caranya keagaam Islam dan Kristen membina integrasi sosial di kelurahan Sawah Brebes Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandarlampung. Konflik dan integrasi yang akan dibahas dibatasi khusus pada konflik dan integrasi yang dilatarbelakangi oleh perbedaan doktrin keagama dilihat dari target objektifnya tanpa menafikan tujuan-tujuan lain dari konflik dan integras sosial tersebut.

Adapun alasan pemilihan permasalahan konflik dan integrasi ini adalah karena kedua pola integrasi sosial ini masih mewarnai pola integrasi sosial kedua kelompok Keagamaan Islam dan Kristen di Kelurahan Sawah Brebes Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandarlampung.

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk melihat bagaimana perbedaan doktrin keagamaan (islam dan Kristen) diakomodasi oleh masing-masing pemeluknya sebagai referensi sosial yang menguatkan batas-batas golongan sosial dalam interaksi sosial sehingga bisa menciptakan konflik sosial dan bagaimana masing-

masing pemeluk agama tersebut melongarkan perbedaan nilai-nilai keagama yang mereka miliki dan berusaha berintegrasi dalam struktur sosial yang lebih makro.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Kajian Konseptual

##### 1. Masyarakat Majemuk

Istilah masyarakat majemuk (plural society) pertama kali dikemukakan oleh Furnivall, dimana dia menggambarkan masyarakat Indonesia pada masa Hindia Belanda adalah merupakan masyarakat majemuk. Definisi masyarakat majemuk menurut Furnivall (Zed, 1994:154): adalah masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa adanya pembauran satu sama lain di dalam suatu kesatuan politik.

Furnivall (Garna, 1996: 164) menjelaskan masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai ragam kelompok atau golongan yang memiliki kebudayaan sendiri-sendiri dengan demikian berbeda pula dalam agama, bahasa dan adat kebiasaan. Sementara itu Garna (1996:164) menjelaskan: masyarakat

majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok rasa tau etnik yang berada di bawah satu system pemerintahan, karena itu seringkali masyarakat majemuk menjalani konflik, pertentangan dan paksaan.

Smith (Garna, 1996: 165) menjelaskan:

... masyarakat majemuk juga memiliki berbagai kelompok yang kebudayaannya beragam, sehingga sering berlangsung perpecahan dan pertentangan. Sedangkan dari sisi politik, masyarakat majemuk itu di kuasai oleh satu kelompok minoritas yang juga memiliki kebudayaan sendiri dan masyarakat majemuk berwujud bukan atas dasar system nilai-nilai yang sama, tetapi oleh dasar konflik dan paksaan.

Berghe (garna, 1996: mejelaskan cirri-ciri masyarakat majemuk (1) ketiadaan consensus nilai-nilai, (2) beraneka ragam kebudayaan, (3) terjadi konflik antara kelompok yang berlainan, (4) kebebasan diantara bagian-bagian dalam system sosial, (5) diperlukan paksaan dan saling ketergantungan dalam ekonomi sebagai dasar

integrasi sosial, (6) terjadi doninasi politik oleh golongan-golongan tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam sebuah masyarakat yang majemuk baik dari segi agama, etnis, budaya, maupun adat istiadat, secaca alamiah mengandung benih-benih pertikaian. Kemajemukan sosial merupakan factor potensial dalam membangkitkan konflik ditengah-tengah masyarakat.

## 2. Konflik sosial

Dalam The little oxford dictionary edisi ke VI, konflik (conflict) mempunyai makna yang bervariasi, diantara sebagai berikut:

Fight (perkelahian, pertengkaran, pertarungan, pertarungan), struggle (perjuangan), opposition (perlawanan), clashing (Perselisihan).

(Swannel,1986:110) Sedangkan Seokanto (1983:60) mendefinisikan conflict dengan konflik pertikaian, pertarungan yakni proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan

pihak lawan, tanpa memperhatikan norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku.

Syaifuddi (1986:63-66) dan Margaret M. Poloma (2000:107-120) mengutip beberapa proposisi simmel yang telah dirumuskan dan dipertajam kembali oleh Coser. Sepuluh dari proposisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konflik berfungsi menegakan dan mempertahankan identitas dan batas-batas kelompok sosial dan masyarakat. Konflik antara suatu kelompok dengan kelompok lain memungkinkan ditegaskannya kembali identitas kelompok satu sama lain dan mempertahankan batas-batasnya terhadap lingkungan sosial di luarnya.
2. Konflik tidak selalu bersifat disfungsional dalam konteks hubungan dimana konflik tersebut terjadi; sebaliknya seringkali konflik diperlukan untuk mempertahankan hubungan tersebut. Tanpa cara-cara menyalurkan kebencian satu sama lain, anggota-anggota kelompok cenderung sepenuhnya beraksi keras,

atau barangkali menarik diri, oleh karena itu konflik dapat berfungsi sebagai katup pengaman, sehingga sistem sosial tersebut dapat dipertahankan dalam batas-batas tertentu.

3. Dilihat dari konflik sebagai sarana dan konflik sebagai tujuan, maka terdapat dua macam konflik, yakni konflik realistik dan nonrealistik. Konflik yang timbul karena tuntutan tertentu dan diarahkan kepada objek tertentu disebut konflik realistik. Sebegitu jauh konflik adalah sarana mencapai tujuan. Sebaliknya dalam konflik-konflik non-realistik, konflik itu sendiri adalah tujuan, tidak dikondisikan oleh objek tertentu, dan berfungsi memenuhi kebutuhan untuk meredakan ketegangan dari sekurang-kurangnya salah satu pihak yang bertentangan.
4. Konflik yang lebih radikal dapat terjadi dalam keadaan hubungan dekat. Terbentuk perkumpulan dan organisasi oposisi dalam hubungan tersebut dapat mempertajam konflik secara khas. Semakin besar keikutsertaan dalam kelompok dan keterlibatan pribadi anggota-anggotanya maka semakin besar terjadinya

konflik. Reaksi terhadap ketidaksetiaan pada kelompok juga makin besar dan kesetiaan pada kelompok adalah dua aspek dalam hubungan yang sama.

5. Konflik dapat melenyapkan unsur-unsur yang memecah-belah dan menegakkan persatuan. Sebegitu jauh, konflik yang dapat meredakan ketegangan. Sehingga dengan demikian dapat pula bahwa konflik berfungsi stabilisator sistem sosial. Walaupun demikian, tidak semua konflik memiliki fungsi positif bagi hubungan tersebut, melainkan konflik yang hanya menyangkut tujuan, nilai-nilai, atau kepentingan-kepentingan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar masyarakat dimana hubungan ditegakkan. Selain itu konflik yang membahayakan konsensus masyarakat dapat diredam oleh hadirnya kelompok berstruktur longer dengan orientasi yang tersebar keseluruhan aspek kehidupan masyarakat.
6. Konflik suatu kelompok dengan kelompok lain menghasilkan mobilisasi energi para anggota kelompok yang bersangkutan, sehingga kohesi



setiap anggota kelompok ditingkatkan. Apakah meningkatnya sentralisasi kelompok tentulah, tentulah tergantung pada ciri dan sifat konflik dan jenis kelompok yang ada. Sentralisasi biasanya lebih terjadi pada kejadian perang dimana terdapat diferensiasi dalam struktur yang memerlukan pembagian kerja yang jelas. Despotisme nampaknya kurang terkait dengan kurang kohesi. Unsur ini dibutuhkan untuk menyalurkan pertentangan dimana tidak cukup terdapat solidaritas dalam kelompok yang bersangkutan untuk mengerakkan energi para anggotanya. Pada kelompok yang bertentangan dengan kelompok diluarnya, sentralisasi dan despotisme tergantung pada system nilai dan struktur kelompok sebelum terjadinya konflik tersebut.

7. Ada tiga aspek struktur kelompok yang harus dipertahankan, dan situasi sosial. Yang dimaksud dengan situasi sosial tersebut adalah, apakah pertentangan tersebut tersebut terus-menerus atau kadangkala Aspek-aspek diatas

tidak bisa berdiri sendiri, karena yang satu terkait dengan yang lainnya.

8. Suatu konflik dimana para pelakunya merasa bahwa mereka semata-mata wakil konflik atau kelompok cenderung lebih radikal, karena kesadaran bahwa perjuangan mereka dilandaskan pada ideologi tertentu yang tidak semata-mata pribadi sifatnya. Keyakinan agama dapat dimasukkan dalam kategori ini.
9. Konflik dapat menciptakan jenis-jenis interaksi yang baru diantara pihak-pihak yang bertentangan yang sebelumnya ada. Konflik berlaku sebagai ransangan untuk menciptakan aturan-aturan dan sistem norma yang baru, yang mampu mengatur pihak-pihak yang bertentangan tadi sehingga keteraturan sosial kembali terwujud.
10. Konflik dapat mempersatukan orang-orang atau kelompok yang tadinya tidak saling berhubungan, koalisi dan organisasi dapat timbul dimana kepentingan pragmatis utama pada pelakunya terlibat.

Suparlan (dalam antropologi Indonesia, 1999:1) mengatakan konflik dapat dilihat sebagai sebuah perjuangan antar individu atau kelompok untuk memenangkan suatu tujuan yang sama-sama ingin mereka capai. Kekalahan atau kehancuran pihak lawan dilihat oleh yang bersangkutan yang bersangkutan sebagai suatu tujuan untuk memenangkan tujuan yang ingin dicapai. Berbeda persaingan atau kompetisi yang memiliki tujuan pencapaian kemenangan melalui keunggulan prestasi dari yang bersaing, maka dalam konflik, tujuannya adalah penghancuran pihak lawan, karena itu tujuan untuk memenangkan sesuatu yang ingin dicapai acapkali menjadi tidak penting keinginan untuk menghancurkan pihak lawan. Konflik sosial yang merupakan perluasan dari konflik individu, umum terwujud dalam bentuk konflik fisik atau perang antar dua kelompok atau lebih yang biasanya selalu terjadi dalam keadaan berulang. Sesuatu perang sebagai sistem, umumnya terjadi karena ketiadaan, tidak cukupnya atau telah hancurnya prosedur-prosedur yang dapat digunakan untuk menjabatani perbedaan-perbedaan yang dapat

memecahkan atau menghentikan perang atau konflik tersebut. Menurut para sosiolog dalam konflik kepentingan-kepentingan yang dipunyai orang perorangan atau kelompok berada diatas norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dahrendorf (1986:306) mengemukakan kehidupan manusia dimasyarakat didasari oleh konflik, yang bukan semata-mata dikarenakan oleh sebab-sebab ekonomi bagaimana dikemukakan oleh Karl Marx, melainkan karena berbagai aspek yang ada dalam masyarakat, yang dilihat sebagai organisasi sosial. Organisasi menyajikan pendistribusian kekuatan sosial kepada warganya secara tidak merata. Karena itu warga suatu masyarakat akan tergolong kedalam mereka yang mempunyai dan yang miskin, dalam kaitan dengan kekuatan sosial atau kekuasaan. Karena organisasi itu juga membatasi berbagai tindakan manusia, maka pembatasan maka pembatasan tersebut juga hanya dapat dilakukan oleh mereka yang mempunyai kekuasaan. Mereka yang miskin kekuasaan yang terkena oleh

pembatasan-pembatasan secara organisasi oleh yang mempunyai kekuasaan, akan berada dalam konflik dengan mereka yang mempunyai kekuasaan. Oleh karena itu konflik merupakan sesuatu yang endemik atau yang selalu ada dalam kehidupan manusia bermasyarakat.

Model gotong-royong dan anti individualisme atau anti individualitas dengan aturan main yang datangnya dari atas selama pemerintahan orde baru, telah menghasilkan berbagai bentuk konflik terselubung, konflik tersebut sebagai konflik terbuka, karena tidak seimbang hubungannya kekuatan sosial yang dipunyai oleh yang berkuasa, dengan yang dipunyai oleh yang dikuasai atau rakyat sehingga rakyat tidak berani menentang kekuasaan pemerintah secara terang-terangan. Konflik terselubung terjadi antara mereka yang menikmati berbagai bentuk kekuasaan dan fasilitas pemerintah orde baru dan yang tidak. (Superlan, 1999:8)

Alqadri (dalam antropologi Indonesia:1999:37) mengemukakan beberapa faktor penyebab

timbulnya konflik, antara lain sebagai berikut: pertama faktor budaya dan psikologis. Konflik yang dipicu oleh faktor ini antara lain berkaitan dengan perbedaan budaya yang terdapat pada kelompok etnis/agama yang sedang mengadakan hubungan. Perbedaan-perbedaan budaya antara satu kelompok dengan kelompok lain terwujud atau dikemukakan antara lain dalam bentuk sistem nilai baudaya (cultural value system) dan orientasi nilai budaya (cultural value orientation). Kedua unsur budaya diatas, yang menjelma secara konkrit dalam bentuk mentalitas dan perilaku, cenderung mempengaruhi berhasil atau tidaknya proses atau program pembangunan dari kelompok yang bersangkutan, atau dari suatu bangsa. Sikap mentalitas, perilaku dan perbuatan dari atau yang dilakukan oleh anggota atau masyarakat kelompok etnis/agama tertentu (umumnya tidak sesuai dengan kebiasaan,, tradisi dan adapt kelompok etnis lainnya, khususnya kelompok etnis setempat, cenderung menimbulkan keresahan, ketidakpuasan, kekecawaan dan luka atau kepedihan. Kedua, factor structural yang berkaitan dengan ekonomi dan politik, ini mengambil bentuk

dalam kompetisi sosial ekonomi dan politik yang tidak adil. Keterlibatan aparat pemerintah yang berkolusi dengan konglomerat dan dan anggota kelompok pendatang. Mereka meminggirkan atau memarjinalisasi para anggota kelompok setempat melalui dominasi atau eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Etnis/agama dengan identifikasi politik atau ekonomi sulit untuk melihat apakah konflik itu berbau etnis/agama atau sekedar komoditas politik atau ekonomi.(Alfitra Salam, TEMPO,25 Maret 2001)

Selo Soemarjan (Kompas, 22 Maret 2001) menyebut beberapa faktor penyebab terjadinya konflik etnis/agama antara lain sebagai berikut: a) ada dua suku/agama yang hidup berdampingan, b) dalam hubungan sosialnya terjadi interaksi, c) dalam interaksi itu dirasakan oleh salah satu atau kedua pihak bahwa ada unsure-unsur budaya yang bertentangan, ada ketimpangan sosial, atau ada sumber penghidupan yang menjadi rebutan.

#### a. Bentuk-Bentuk Konflik

Coser ( dalam Internasional encyclopedia of the sosial sciences, 1971: 232) mengatakan: conflicts may take place between individuals, between collektivities, intergroup as intergroup.

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa konflik bias terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Handoko dalam bukunya manajemen (1997:349)

Dilihat dari kanflik sebagai sarana dan konflik sebagai tujuan, maka terdapat dua macam konflik sebagai sarana dan konflik sebagai tujuan, maka terdapat dua macam konflik, yakni konflik realistic dan konflik non realistik. Konflik yang timbul karena tuntutan-tuntutan tertentu disebut konflik realistik. Sebegitu jauh konflik adalah sarana mencapai tujuan. Sebaliknya dalam konflik-konflik non realistik, konflik itu sendiri adalah tujuan tidak dikondisikan oleh objek tertentu, dan berfungsi memenuhi kebutuhan untuk meredakan dari



sekurang-kurangnya salah satu pihak yang bertentangan. Saffuddin (1986:64).

Suparlan (dalam antropologi Indonesia, 1999:8) mengatakan: Model gotong-royong dan anti individualism atau individualitas dengan aturan amin yang datangnya dari atas selama pemerintahan Orde Baru, telah menghasilkan berbagai bentuk konflik terselubung, konflik tersebut tidak terwujud sebagai konflik terbuka, karena tidak seimbangya kekuatan sosial yang dipunyai oleh yang berkuasa, dengan yang dipunyai oleh di kuasai atau rakyat sehingga rakyat tidak berani menentang kekuasaan pemerintah secara terang-terangan. Konflik terselubung terjadi antara mereka yang menikmati berbagai bentuk kekuasaan dan fasilitas pemerintah Orde baru dan yang tidak.

Robertson (1988:209-216) mengelompokan konflik tersebut ke dalam tiga kelompok yaitu konflik idiologis yang terjadi karena perbedaan idiologis yang dianut oleh masing-masing kelompok, konflik kelas karena adanya perbedaan kelas dalam strata

sosial dan konflik politik yang berkenaan dengan penguasa dan yang dikuasai.

Sebutan konflik agama, etnis politik dan kebudayaan adalah dilihat dari segi latar belakang munculnya konflik tersebut. Konflik agama dan etnis terjadi karena sentiment agama dan etnis, politik tersangkut denganketidakadilan dalam pendistribusian kekuasaan atau otoritas, sedangkan ekonomi terjadi karena ketidakadilan dalam akses ke sumber ekonomi. Persoalan yang muncul adalah apakah agama, ekonomi, politik budaya tersebut merupakan elemen yang terdiri sendiri dalam membentuk konflik sosial? Pelly (dalam antropologi Indonesia, 1999:27) mengatakan: etnis dan agama merupakan alat yang strategis dalam proses konflik sosial. Konflik sosial yang terjadi di Indonesia menjelang era reformasi (Mei 1998) disebabkan oleh kesenjangan sosial ekonomi yang kronis dan akumulatif yang dikemas oleh faktor-faktor etnis dan agama.

Asga Ali Engineer (dalam dialog kritik dan identitas agama, 220) mengatakan: Konflik antar Islam dan

Hindu di India tepatnya di Gujarat dan Maharestra disebabkan oleh para elit urban (Islam) di kawasan ini bersikeras dengan suatu identitas terpisah dan mempunyai rasa kebudayaan indo-Islam yang kukuh sehingga mereka tidak mau diajak oleh umat Hindu menjadi bagian dari mainstream nasional.

Hendropuspito (1993:151) mengatakan: bentrokan antara umat Kristen Gereja Purba dengan umat Yahudi, benturan umat Kristen dengan penganut agama Romawi dalam abad pertama sampai dengan ketiga masehi merupakan konflik sosial yang berlatar belakang pada perbedaan doktrin keagamaan.

Mahmud (dalam Republika, 26 – 12- 2001) Mengatakan: Konflik yang terjadi di Posoa antara umat Islam dan Kristen dipicu oleh kesenjangan taraf hidup. Agama dan adat Istiadat hanyalah alat pembenaran saja dalam rangka memobilisasi masa. Weber (dalam Thomas F. Odea, 1996:42) mengatakan: acuan trasendental dalam agama telah membawa kewajiban bagi umatnya tanpa tawar-

tawar (perbuatan yang suci dan mutlah harus dilakukan).

Komaruddin Hidayat (dalam Republika 4 Januari 2002) mengatakan: sentiment keagamaan memiliki kekuatan untuk menebus batas etnis Negara dan bangsa. Oleh karena itu sulit untuk menilai konflik itu dari factor tunggal.

#### b. Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Konflik

Suparlan (dalam antropologi Indonesia, 1999:2) mengatakan: konflik sosial terjadi karena ketiadaan, tidak cukupnya atau telah hancurnya prosedur-prosedur yang dapat di gunakan untuk menjembatani perbedaan-perbedaan yang dapat memecahkan atau menghentikan konflik tersebut. Menurut para sosilog, dalam konflik, kepentingan-kepentingan yang dipunyai orang perorangan atau kelompok berada di atas norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dahrendof (1986-306) mengemukakan: kehidupan manusia dalam masyarakat didasari oleh konflik kekuatan yang bukan semata-mata dikarenakan oleh

sebab-sebab ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh Karl Marx, melainkan karena berbagai aspek yang ada dalam masyarakat, yang di lihat sebagai organisasi sosial. Organisasi menyajikan pendistribusian kekuatan sosial kepada warganya secara tidak merata. Karena itu, warga suatu masyarakat akan tergolong ke dalam mereka yang mempunyai dan yang miskin, dalam kaitan dengan kekuatan sosial atau kekuasaan. Karena organisasi itu juga membatasi berbagai tindakan manusia. Maka pembatasan-pembatasan tersebut juga hanya dapat dilakukan oleh mereka yang mempunyai kekuasaan. Mereka yang miskin kekuasaan yang terkena oleh pembatasan-pembatasan secara organisasi oleh yang mempunyai kekuasaan, akan berada dalam konflik dengan mereka yang mempunyai kekuasaan. Oleh karena itu konflik telah merupakan sesuatu yang endemic atau yang selalu ada dalam kehidupan manusia bermasyarakat.

Alqadri (dalam antropologi Indonesia, 1999:37) mengemukakan beberapa factor penyebab timbulnya konflik, antara lain sebagai berikut: pertama, factor

budaya dan psikologis. Konflik yang dipicu oleh factor ini antara lain berkaitan dengan perbedaan budaya yang terdapat kelompok etnis/agama yang sedang mengadakan hubungan. Perbedaan-perbedaan budaya antara satu kelompok dengan kelompok lain terwujud atau ditemukan antara lain dalam bentuk system nilai budaya (cultural value system) dan orientasi nilai budaya (cultural value orientation). Kedua unsur budaya diatas yang menjelma secara kongkrit dalam bentuk mentalitas atau perilaku, cenderung mempengaruhi berhasil atau tidaknya proses program pembangunan dari kelompok yang bersangkutan, atau dari suatu bangsa. Sikap mentalitas, perilaku atau perbuatan dan atau yang dilakukan oleh anggota atau masyarakat kelompok etnis/agama tertentu umumnya pendatang yang tidak sesuai dengan kebiasaan, tradisi dan adat istiadat dari kelompok etnis lainnya, khususnya kelompok etnis setempat, cenderung menimbulkan keresahan, ketidakpuasan, kekecewaan dan luka atau kepedihan. Kedua, factor structural yang berkaitan dengan ekonomi dan politik, ini mengambil bentuk dalam

kompetisi social ekonomi dan politik yang tidak adil. Keterlibatan aparat pemerintah yang berkolusi dengan konglomerat dan anggota kelompok pendatang. Mereka meminggirkan atau memarjinalisasi para anggota kelompok setempat melalui dominasi atau eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam.

Etnis/agama dengan identifikasi politik atau ekonomi sulit untuk melihat apakah konflik itu berbaur etnik/agama atau sekedar komoditas politik atau ekonomi (Alfitri Salam, Tempo, 25 Maret 2001).

Selo Soemardjan (Kompas, 22 Maret 2001) menyebutkan beberapa factor penyebab terjadinya konflik etnis/agama antara lain sebagai berikut:

- a). ada dua suku/agama yang hidup berdampingan,
- b). dalam hubungan sosialnya terjadi interaksi,
- c). dalam interaksi itu dirasakan oleh salah satu atau kedua pihak bahwa ada unsure-unsur budaya yang bertentangan, ada ketimpangan social, atau ada sumber penghidupan yang menjadi rebutan.

Hendropuspito (1993:151-164) mengatakan ada empat factor yang mendorong terjadinya konflik social keagamaan, yaitu: perbedaan doktrin dan sikap mental, perbedaan suku dan ras pemeluk agama, perbedaan tingkat kebudayaan dan mayoritas dan minoritas golongan agama.

### 3. Integrasi Sosial

Disamping interaksi sosial yang dissosiatif (konflik sosial) di dalam masyarakat terdapat juga pola interaksi sosial assoosiatif yang yang berimplikasi pada terciptanya masyarakat yang terintegrasi, terpadu dalam satu kesatuan, As Homby (1978:444) mengatakan integrasi merupakan kata benda dari kata kerja integrate yang berarti Combine (parts) into Whole bring or come into equal membership of society; and racial etc. Integration or being integrated; the integration of black children into the school system in the southern state of America.

Kontowijoyo mengutip pendapat Myron Weiner mendefinisikan integrasi dengan Which hold a society and a political system together. Fokus dari



integrasi sosial tersebut adalah bagaimana system-system, lembaga-lembaga sosial itu saling terkait dan saling menunjang. Masyarakat yang terintegasi tersebut biasanya diikat oleh suatu sistem nilai budaya. Sebagaimana hasil penelitian Durkheim dan Radcliffe-Brown tentang masyarakat Trobriand yang menyimpulkan... meskipun darah dan kesinambungan yang tidak material dengan para arwah itu menimbulkan kekekalan dan persatuan subklien, seperti yang ditekankan oleh dogma tentang kehamilan itu itu semua tidak dapat membuat subklien menjadi bebas dan dapat melestarikan dirinya sendiri (Keesing,1992:115)

Suparlan (dalam antropologi Indonesia, 1999:8) yang mengutip pendapat Talcott Parsons dan Edward Shils mengatakan; proses-proses sosial yang terwujud sebagai tindakan-tindakan sosial pada dasarnya bertujuan untuk dapat saling bekerjasama para pelaku yang merupakan warga masyarakat. Karena itu proses-proses sosial mempunyai fungsi-fungsi yang menekankan tujuan untuk terwujudnya kehidupan sosial dan kemasyarakatan yang bercorak

keseimbangan atau ekuilibrium diantara unsur-unsurnya, sehingga menghasilkan adanya integrasi sosial dan integrasi kemasyarakatan. Oleh Person dan pengikutnya, tindakan-tindakan yang terwujud sebagai konflik dilihat sebagai penyimpangan, atau tidak fungsional dalam kehidupan manusia.

Menurut Persons sebagaimana terintegrasinya bagian-bagian dari organisme biologi dari tubuh manusia, masyarakatpun dalam melaksanakan fungsi-fungsi diantara institusi yang ada juga punya saling ketergantungan yang sangat tinggi.

Kahmad (2000:63) mengatakan inti pembahasan Persons adalah konsep sistem, yang merupakan hal sangat sentral dalam tindakan. Teori umumnya tentang tindakan mencakup empat sistem yaitu sistem kebudayaan sosial kepribadian dan perilaku organisme. Sistem kebudayaan yang unit analisisnya adalah sistem simbol yang didalamnya terdapat keyakinan agama, bahasa dan nilai-nilai kebangsaan, ketika nilai-nilai sosial ini menginternal dalam masyarakat sehingga terjadi sosialisasi nilai-nilai

tersebut merupakan kekuatan integrasi dalam melaksanakan kontrol serta mengikat semua masyarakat sistem kebudayaan tersebut mempengaruhi cara orang berinteraksi. Oleh karena itu sistem sosial tersebut ditentukan oleh sistem kebudayaan. Terciptanya masyarakat yang terintegrasi didasari oleh sistem kebudayaan yang mengikat perilaku masyarakat.

Jhonson (1986:181-184) mengemukakan Durkheim menyebut istilah integrasi sosial atau kekompakan sosial dengan istilah integrasi sosial atau kekompakan sosial dengan istilah solidaritas sosial menjadi dua bagian; solidaritas mekanik dan solidaritas organis sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Solidaritas mekanik didasarkan pada suatu “Kesadaran kolektif” yang menunjukkan pada totalitas kepercayaan dan pola normative yang sama pula. Karena itu individualitas tidak berkembang; individualitas itu terus menerus dilumpuhkan oleh tekanan yang besar sekali untuk konformitas. Bagi Durkheim indikator yang paling jelas untuk solidaritas mekanik adalah ruang lingkup dan

kerasnya hukuman yang bersifat menekan (repressive). Hukum-hukum ini mendefinisikan setiap perilaku sebagai sesuatu yang jahat, yang mengancam atau melanggar kesadaran kolektif yang kuat itu, hukuman terhadap penjahat memperlihatkan pelanggaran moral, karena merusak dasar keteraturan sosial

Hukuman tidak harus mencerminkan pertimbangan rasional yang mendalam mengenai jumlah kerugian secara obyektif yang menimpa masyarakat, juga tidak merupakan pertimbangan yang diberikan untuk menyesuaikan hukuman itu dengan kejahatan; sebaliknya hukuman itu mencerminkan dan menyatakan kemarahan kolektif yang muncul tidak terlalu banyak oleh sifat orang yang menyimpang atau tindakan kejahatannya seperti penolakan terhadap kesadaran kolektif yang diperlihatkannya. Ciri khas yang penting dari solidaritas mekanik adalah bahwa solidaritas itu didasarkan pada suatu tingkat homogenitas yang tinggi dalam kepercayaan, sentiment dan sebagainya. Homogenitas

semacam itu hanya kalau pembagian kerja bersifat sangat minim.

Berlawanan dengan ini solidarities organik muncul karna pembagian kerja bertambah besar. Solidaritas itu didasarkan pada tingkat saling ketergantungan yang tinggi. Saling ketergantungan itu bertambah sebagai hasil dari bertambahnya perbedaan dikalangan individu. Munculnya perbeda-perbedaan dikalangan individu merombak kesadaran kolektif itu, yang pada gilirannya menjadi kurang penting lagi sebagai dasar untuk keteraturan sosial dibandingkan dengan saling ketergantungan fungsional yang bertambah antara individu-individu yang memiliki spesialisasi dan secara relatif lebih otonom sifatnya.

Durkheim mempertahankan bahwa kuatnya sosidaridas organic itu ditandai oleh pentingnya hukum yang bersifat memulihkan (restitutive) dari pada yang bersifat represif. Tujuan kedua tipe hukum itu sangat berbeda. Hukum restitutif berfungsi untuk mempertahankan atau melindungi

pola saling ketergantungan yang kompleks antara berbagai individu yang berspesialisasi atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Karena itu hukuman yang diberikan kepada seorang penjahat berbeda Dalam kedua hukum itu. Tipe sangsi yang bersifat restitutif, Durkheim mengatakan bukan bersifat balas dendam, melainkan sekedar memulihkan keadaan.

Dalam system organic, kemarahan kolektif yang timbul karena perilaku menyimpang menjadi kecil kemungkinannya, karena kesadaran kolektif itu tidak begitu kuat. Sebagai hasilnya hukum lebih bersifat rasional, disesuaikan dengan parahnya pelanggaran dan bermaksud untuk memulihkan atau melindungi hak-hak dari pihak yang dirugikan atau menjamin bertambahnya pola saling ketergantungan yang kompleks yang mendasari solidaritas sosial. Pola restitutif ini jelas terlihat dalam hukum-hukum pemikiran, hukum kontrak hukum perdagangan dan peraturan administrative dan prosedur-prosedur.

Sayafuddin (1986: 68 ) yang mengutip pendapat Clifford Geertz dalam analisisnya mengenai konflik dan interaksi agama di Jawa dalam perspektif Antropologi mengatakan aspek-aspek kebudayaan primordial sebagai unsure lama yang tetap bertahan pada tingkat tertentu dalam kebudayaan Jawa masa kini bias berfungsi sebagai pengikat ketiga varian keagamaan di Jawa, yakni Abangan, santri, dan priyayi. Di lain pihak, berkembangnya kebudayaan nasional dilihat Geertz sebagai faktor yang ikut mewujudkan interaksi masyarakat tersebut.

Toneko (1990: 118) menggambarkan masyarakat yang terintegrasi tersebut dengan masyarakat yang selalu melaksanakan kerjasama dalam segala aspek kehidupan. Dalam konsep-konsep sosiologi, kerjasama biasanya disebut dengan “cooperation”, konsep cooperation dapat dibedakan antara lain, “spontaneous cooperation”, “directed cooperation”, “contractual cooperation” dan “traditional cooperation”. Yang kedua merupakan hasil perintah atasan/penguasa, yang ketiga

merupakan bentuk kerjasama sebagai bagian atau unsur-unsur sosial.

Asumsi-asumsi atau proposisi-proposisi yang dikemukakan oleh teoritis konflik dan konsensus (integrasi) diatas akan penulis gunakan untuk menganalisa dan memahami bagaimana masing-masing pemeluk agama mengakomodasi perbedaan nilai keagamaan yang mereka miliki sebagai referensi sosial dalam melaksanakan interaksi sosial yang menguatkan batas-batas golongan sosial sehingga tercipta konflik sosial dan bagaimana masing-masing pemeluk agama melonggarkan perbedaan nilai-nilai keagamaan yang mereka miliki dan berusaha berinteraksi dalam struktur sosial yang lebih makro sehingga tercipta integrasi sosial.

#### a. Proses Integrasi Sosial

Sebagai suatu proses dan kondisi sosial, integrasi sosial sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial antara individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lain. Oleh karena itu kekuatan yang mempengaruhi interaksi sosial pada akhirnya akan



berpengaruh juga terhadap proses integrasi sosial. Pada dasarnya proses integrasi sosial akan melalui beberapa tahap. Tahap-tahap tersebut dapat berlangsung secara evolusioner dari tahap yang rendah, yaitu tahap terisolasinya (terpisahnya) kelompok minoritas dari kehidupan sosial dan kebudayaan kelompok dominan menuju tahap yang paling tinggi, yaitu tahap bercampurnya kelompok minoritas kedalam kehidupan sosial dan kebudayaan kelompok dominan.

Namun kadang kala dapat pula terjadi loncatan dari tahap yang paling rendah ke tahap yang paling tinggi secara cepat. Proses integrasi sosial pada umumnya melalui beberapa tahap, yaitu tahap-tahap segregasi atau separatisme, akomodasi, akulturasi, asimilasi dan amalgamasi

Tahap pertama dalam proses integrasi sosial adalah tahap segregasi atau separatisme (pemisahan). *Segregation can be defined as the involuntary separation of residential areas, services or other facilities on the basis of the ethnic or racial*

*characteristic of the people using them. The most extreme form of self segregation is separatism, when the minority group aspires to set up a totally independent society of its own.* Tahap segregasi (segregation) menggambarkan usaha-usaha untuk memisahkan kelompok minoritas, baik secara de jure maupun secara de facto. Secara de jure artinya bahwa pemisahan itu didukung oleh kekuatan hukum, seperti politik apartheid yang terjadi di Afrika Selatan beberapa puluh tahun yang lalu. Sedangkan secara de facto artinya bahwa pemisahan itu terjadi dalam kenyataan dan tak perlu didukung oleh kekuatan hukum.

Tahap kedua adalah tahap akomodasi (*accommodation*). *Accommodation occurs when two groups co-exist as separate cultures in the same society. "Accommodation occurs when the members of a minority group are aware of dominant norms and values without having internalized them"*. Tahap akomodasi merupakan tahap yang para anggota dari kelompok minoritas menyadari norma-norma dan nilai-nilai dari kebudayaan kelompok dominan,

namun mereka tak perlu merubah norma-norma dan nilai-nilai kebudayaan mereka sendiri. Mereka menyesuaikan diri dengan kebudayaan kelompok dominan tanpa berpartisipasi secara penuh di dalamnya atau tidak menginternalisasikan nilai-nilai dan norma-norma tersebut. Apabila dua kelompok hidup bersama dalam satu masyarakat yang sama sementara kebudayaannya tetap terpisah, maka hal itu disebut akomodasi. Secara esensial mereka mempunyai kebudayaan yang sejajar (parallel) namun masing-masingnya tetap dengan institusi-institusinya sendiri. Meskipun akomodasi setidak-tidaknya memberikan dorongan lahir terhadap norma persamaan (*the norm of equality*). Tahap akomodasi, integrasi sosial yang dicapai akan memperlihatkan adanya suatu keseimbangan dalam integrasi antara orang perorangan kelompok-kelompok manusia sehubungan dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Keseimbangan yang dicapai hanya bersifat sementara, yakni selama norma dan nilai yang mengatur dalam masyarakat tersebut dipatuhi.

Tahap ketiga adalah tahap akulturasi (*acculturation*). Popenoe mengemukakan bahwa: *“acculturation is the process in which a minority individual or group seeks to blend into a society by taking on its cultural characteristics”* Tahap akulturasi terjadi bila orang-orang dari kelompok minoritas telah mengadopsi norma-norma, nilai-nilai dan pola-pola perilaku dari masyarakat kelompok dominan. Namun pada tahap ini mereka masih belum diakui atau diterima dalam kelompok masyarakat dominan tersebut secara lebih intim (akrab). Akulturasi mencakup pembelajaran bahasa, sejarah, dan perilaku atau tata karma dari kelompok dominan. Ia juga melibatkan penerima kesetiaan dan nilai-nilai kelompok dominan sebagai miliknya sendiri. Namun penerimaan disini bukanlah penerimaan secara penuh (utuh). Bila penerimaannya dilakukan secara penuh (utuh), maka hal itu sudah berarti termasuk tahap asimilasi, dimana kelompok minoritas terintegrasi secara utuh kedalam institusi-institusi masyarakat dominan dan kelompok bawahan (*subordinate group*).

Tahap keempat adalah tahap asimilasi (*asimlasion*). Popenoe menjelaskan bahwa “*Assimilation is the absorption into the dominant society of the culture and social structure of an incoming group. Another term for assimilation is the melting pot*”. Asimilasi merupakan suatu proses yang kelompok-kelompok dengan identitas berbeda, yakni antara kelompok minoritas dan kelompok dominan menyatu (terpadu) secara sosial dan kultural. Tahap ini terjadi apabila kelompok minoritas telah membaur (menyatu) kedalam masyarakat dominan secara penuh (utuh) melalui persahabatan (*friendship*) atau pergaulan-pergaulan karib lainnya. Pada tahap kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayanya akan bergaul secara integrative untuk jangka waktu yang cukup lama maka kebudayaan dari kelompok manusia tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri.

Tahap akhir dari proses integrasi sosial adalah tahap amalgamasi (*amalgamation*) Popenoe mengemukakan bahwa: “*While assimilation means a social and culture merging. Amalgamation refers*

*to biological merging of an athenic a racial group with the native population*". Amalgamasi akan terjadi apabila berbagai kebudayaan atau ras (dua atau lebih) bercampur (secara biologis) sehingga membentuk tipe-tipe kebudayaan dan ras yang baru. Cara yang paling utama dalam tahap amalgamasi adalah melalui perkawinan campuran.

#### b. Faktor Penghalang Integrasi Sosial

Ada tiga penghalang utama yang dapat menghambat terwujudnya integrasi sosial, yaitu prasangka negative (*negative prejudice*), diskriminasi, dan rasisme terlembaga (*institutionalized racism*).

##### 1. Prasangka negative (negative prejudice).

*"Prejudice... means an attitude (usually negative) toward the members of some specific group (racial, ethnic, religion, etc) which causes the person holding it to evaluate others negatively, solely on the basis of their identification with that group"*. Prejudis adalah sikap prasangka yang biasanya negatif dari seseorang atau para anggota kelompok terhadap

sekelompok orang tertentu, baik kelompok etnik, agama, ataupun ras dan kelompok organisasi lainnya, yang menyebabkan seseorang yang berprasangka tersebut menilai orang-orang dari kelompok lain secara negative semata-mata berdasarkan identitas mereka terhadap kelompok tersebut. Misalnya apabila seseorang tidak menyukai orang dari suatu kelompok suku bangsa, lalu ia memberikan penilaian bahwa mereka merupakan orang yang kotor, atau tidak bertanggungjawab, cenderung jahat, tidak bermoral, pemalas, susah bergaul, dan sebagainya.

Prejudice biasanya selalu dihubungkan dengan stereotype, yaitu suatu kesan dan kepercayaan tertentu yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang dimana seperangkat ciri atau karakteristik baik yang positif atau negative dihubungkan terhadap sekelompok orang lain dari suatu kelompok sosial tertentu secara keseluruhan, baik kelompok ras, etnik, atau bangsa. Prejudice adalah stereotype, yakni suatu kepercayaan

bahwa orang-orang yang mempunyai kategori yang sama mempunyai karakteristik yang sama dan stereotype tidaklah selalu buruk.

Prejudice erat kaitannya dengan etnosentrisme (ethnosentrisme), yaitu kepercayaan dari seseorang atau sekelompok orang bahwa cara-cara perilaku (budaya dan struktur sosial) mereka adalah yang paling benar dan baik, sedangkan cara-cara perilaku orang atau kelompok lain bukan hanya tidak benar dan baik tapi juga mengancam.

## 2. Diskriminasi.

Tentang diskriminasi, Brinkerhoff dan Federico menjelaskan *“Treating people unequally because of the categories they belong to is discrimination”*. *“Discrimination is the unequal treatment of individuals based on their assumed membership in a particular group”* Diskriminasi merupakan tindakan (perilaku) dari seseorang yang memperlakukan orang lain secara tidak seimbang disebabkan kategori keanggotaan yang



mereka miliki. Diskriminasi mempunyai kaitan yang erat dengan prejudice dan stereotype, yakni bahwa stereotype yang tidak baik akan menimbulkan prejudice yang pada gilirannya sering menyebabkan timbulnya diskriminasi. Sebaliknya diskriminasi akan kembali menimbulkan atau memperkuat stereotype yang kemudian akan menimbulkan prejudice lagi seperti dalam suatu lingkaran setan. Sebagaimana halnya prejudice, diskriminasi juga sering didasarkan atas hal-hal yang tidak logis irasional. Diskriminasi dan prejudice merupakan dua dimensi yang berbeda. Diskriminasi merupakan suatu perilaku (behavior) atau tindakan (action), sedang prejudice merupakan suatu sikap (attitude), yang keduanya oleh psikolog sosial mengacu kepada hal-hal yang negative.

Diskriminasi tidak selalu bebarengan dengan prejudice (Zanden, 1988:259). Seseorang bisa saja memiliki prejudice tanpa harus mendiskriminasikan atau terpisah dari seseorang. Artinya mereka bias saja hidup bersama-sama

dalam suatu kelompok masyarakat. Sebaliknya orang-orang yang tanpa prejudice terhadap suatu kelompok bias saja memperlakukan suatu kelompok secara diskriminatif.

3. Rasisme atau diskriminasi terlembaga (Institutionalized racism).

Rasisme atau diskriminasi terlembaga adalah diskriminasi yang mempengaruhi seluruh struktur norma dan perilaku yang diperkuat (didukung) oleh agen-agen control sosial, baik formal maupun informal. Dalam hal ini orang-orang dari suatu kelompok ras atau suku bangsa ditekan (ditindas) atau dieksploitasi oleh institusi-institusi dalam suatu masyarakat yang control oleh kelompok ras atau suku bangsa lain.

Diskriminasi tidak hanya dilakukan oleh para individu atau orang perorangan, institusi-institusi masyarakatpun bias melakukan diskriminasi secara sistematis terhadap para anggota dari suatu kelompok, baik institusi sosial maupun institusi politik atau ekonomi. Institusi-institusi

sekolah, bisnis, rumah sakit, pemerintah dan institusi lainya kadang-kadang tidak mau mengangkat karyawan/pegawai atau siswa-siswa dari orang yang tidak mereka sukai sehingga terjadi diskriminasi. Hal ini tentu saja akan menghambat terwujudnya integrasi sosial.

Di samping itu Soejono Soekanto secara ringkas mengemukakan pula beberapa factor yang dapat menjadi penghalang terwujudnya integrasi sosial dalam suatu masyarakat, yaitu: 1). Terisolasinya kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat (biasanya golongan minoritas) kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi, 3) perasaan takut terhadap suatu kebudayaan yang dihadapi, 4) perasaan bahwa kebudayaan suatu golongan atau kelompok tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan golongan atau kelompok lainya, 5) perbedaan warna kulit atau cirri-ciri badaniah tertentu, 6) perasaan "in group" yang kuat, yaitu perasaan yang kuat sekali bahwa individu yang kuat sekali bahwa individu terikat pada kelompok dan kebudayaan kelompok yang bersangkutan, 7)

gangguan-gangguan golongan yang berkuasa terhadap golongan minoritas dan 8) perbedaan kepentingan yang kemudian diikuti oleh kepentingan-kepentingan pribadi.

c. Faktor Pendorong Integrasi Sosial

Ada beberapa faktor atau kekuatan yang dapat mendorong terwujudnya integrasi sosial antara lain:

1. Perbedaan dan saling ketergantungan di antara kelompok-kelompok (*differentiation and interdependence among the parts*) atau pertukaran fungsional antara kelompok yang berbeda (*functional reciprocity*). Artinya apabila perbedaan-perbedaan diantara kelompok-kelompok meningkat maka rentang aktivitas atau ruang gerak yang dilakukan oleh masing-masing kelompok akan menyempit, sehingga masing-masing kelompok akan menjadi lebih saling tergantung. Saling ketergantungan yang terdapat pada suatu organisasi atau masyarakat yang sangat

terferensiasi (berbeda) merupakan factor penting dalam menjaga solidaritas (yang menurut Durkheim disebut dengan solidaritas organik) dan integrasi. Keadaan saling ketergantungan akan memaksa kelompok-kelompok sosial yang berbeda-beda untuk bekerja sama satu sama lain.

2. Persetujuan atau konsesus (*consensus*). Artinya apabila para individu atau kelompok memiliki norma-norma, dan kepercayaan-kepercayaan yang sama maka mereka akan terpatri (terikat) bersama-sama melalui suatu jaringan kebudayaan bersama. Bahkan keutuhan mereka berasal dari kesamaan ini. Aktivitas kehidupan mereka dipandu oleh perasaan saling mengharapkan, sehingga secara cultural mereka ibarat “tiruan carbon-copy” satu sama lain.
3. Integrasi normatife (*normative integration*). Artinya dalam suatu masyarakat terdapat keselarasan antaranorma-norma dan perilaku masyarakat, dan adanya tingkat

kepatuhan yang tinggi dari anggota masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku.

4. Konflik. Meskipun secara umum konflik sering diartikan sebagai sesuatu yang negatife dan bersifat memecah belah namun ia juga memiliki fungsi-fungsi positif yang dapat meningkatkan solidaritas dalam kelompok. Konflik di antara kelompok-kelompok yang ada bisa jadi merupakan satu-satunya cara bagi sebagian kelompok agar mereka bias berkomunikasi satu sama lain mengenai masalah-masalah yang selama ini perlu diatasi.
5. Penggunaan otoritas (*the use of authority*). Artinya, orang-orang yang mempunyai otoritas atau pengaruh yang kuat pada pusat-pusat lembaga sosial seperti pemimpin-pemimpin politik, penguasa, pemimpin informal dan sebagai, bias pula menggunakan otoritasnya untuk mencegah terjadinya konflik dan perpecahan atau segmentasi dalam suatu masyarakat.

Dengan kata lain, mereka dapat menginteraksikan kelompok masyarakat yang tersegmentasi melalui pengaruh atau otoritas yang mereka miliki.

6. Mobilitas sosial (*sosial mobility*) Artinya, orang-orang yang mempunyai mobilitas yang tinggi dalam suatu masyarakat, yaitu orang-orang yang mempunyai keinginan dan kemampuan dalam memahami berbagai kebudayaan khusus (*subcultures*) dalam masyarakat, bisa berfungsi sebagai mediator dalam mengatasi berbagai perselisihan antara kelompok-kelompok yang berselisih berdasarkan kemampuan dan pemahaman terhadap kebudayaan-kebudayaan khusus masing-masing kelompok yang dimilikinya.
7. Kekerasan dan pemaksaan. Artinya, pemisahan atau segmentasi dalam masyarakat bisa pula dihindari melalui penggunaan kekerasan dan pemaksaan, yakni memberlakukan aturan-aturan dan kontrol atas kelompok-kelompok melalui ancaman atau penggunaan kekuatan. Bakat atau

kesanggupan untuk membunuh, misalnya, bias merupakan instrument penting dalam kontrol sosial, yang dengan sendirinya dapat berguna dalam mengintegrasikan orang-orang atau kelompok secara paksa.

Sementara itu Soerjono Soekanto mengemukakan pula beberapa factor yang dapat mempermudah terjadinya integrasi sosial diantara kelompok-kelompok yang berbeda kebudayaannya dalam suatu masyarakat, yakni; 1) adanya sikap saling toleransi diantara kelompok-kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat, 2) adanya kesempatan-kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi, 3) adanya sikap saling menghargai terhadap kebudayaan yang didukung oleh masyarakat lain dengan mengakui kelebihan dan kekurangan masing-masing, 4) adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat, yang antara lain diwujudkan dalam pemberian kesempatan yang sama bagi golongan minoritas dalam berbagai bidang kehidupan sosial, 5) pengetahuan akan persamaan unsure-unsur dalam



kebudayaan masing-masing kelompok melalui berbagai penelitian kebudayaan khusus (subcultures), 6) melalui perkawinan campuran antara berbagai kelompok yang berbeda kebudayaan dan 7) adanya ancaman musuh bersama dari luar kelompok-kelompok masyarakat tersebut yang menyebabkan kelompok-kelompok yang ada mencari suatu kompromi agar dapat bersama-sama menghadapi musuh dari luar yang membahayakan masyarakat yang bersangkutan.

Pada dasarnya manusia membutuhkan kehidupan bersama dengan manusia lainya (*zoon politicon*). Dalam menjalani kehidupan bersama, manusia akan terlibat dalam suatu hubungan timbale balik yang di sebut integrasi sosial yang pada gilirannya berkembang kepada inter-relasi sosial. Integrasi sosial merupakan bentuk yang paling utama dalam suatu proses sosial. Ia juga merupakan syarat mutlak bagi terjadinya aktivitas sosial. Dalam interaksi sosial akan terjadi hubungan-hubungan sosial timbal balik (*sosial inter-relationship*) yang dinamis antar perorangan, antar kelompok dan antar perorangan

dengan kelompok orang. Interaksi sosial dalam kenyataannya mungkin berwujud dalam bentuk kerjasama kepada konsensus dan integrasi, atau mungkin juga dalam bentuk persaingan yang bermuara kepada konflik dan disintegrasi.

Mengacu kepada segolongan orang (komunitas) dengan latar belakang asal usul dan budaya yang sama sehingga mereka mempunyai rasa identitas sosial yang sama pula. Sehingga suku bangsa dengan demikian dapat diidentifikasi sebagai golongan sosial sebagaimana yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat, bahwa golongan sosial sebagai satu komunitas yang terwujud karena adanya kesatuan ciri-ciri obyektif yang melekat padanya sehingga akan menimbulkan rasa identitas sosial dan adanya satu system norma yang mengatur komunitas tersebut.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa konsep hubungan antarsuku bangsa tidak hanya mencakup interaksi sosial antara suku bangsa yang bersangkutan, lebih jauh juga akan berkaitan dengan masalah kontak kebudayaan antarsuku bangsa, yang

dalam kelangsungannya dapat bersifat positif maupun negative. Positif dapat mengarah kepada bentuk kerja sama, asimilasi ataupun integrasi sosial di antara suku bangsa, sedangkan sisi negative dapat muncul dalam bentuk pertentangan (konflik) ataupun persaingan, yang pada akhirnya mungkin saja membawa mereka pada bentrokan fisik. Hal ini tidak dapat dielakan kerana masyarakat itu pada dasarnya bersifat kompetitif dan kooperatif.

#### B. Kajian yang Relevan

Berbagai penelitian yang menyangkut dengan konflik antar etnik telah di lakukan oleh peneliti sebelumnya dari sudut pandang yang berbeda. Syarif Ibrahim alqadri (1999) menjelaskan: konflik antara penduduk asli setempat (Melayu) dengan pendatang (Madura) di sebabkan oleh factor demografi. Tekanan jumlah penduduk pendatang Madura terhadap kawasan pemukiman Melayu, kesempatan kerja dan lapangan kerja yang berkaitan secara timbale balik dengan hak-hak kepemilikan (Ownership) juga bertanggung jawab bagi timbulnya pertikaian tersebut. Kesempatan perlahan-lahan tapi

pasti berpindah tangan dari Melayu Sambas ke pendatang Madura. Akar masalah dari tragedy Sambas juga dapat berasal dari factor budaya, karena pendatang (Madura) cenderung tidak mematuhi prinsip budaya setempat.

Selanjutnya Usman Pelly (1999) mengungkapkan: Akar permasalahan yang menulit kerusuhan etnis yang merebak menjelang era reformasi (mei 1998) di berbagai kota Indonesia adalah keenjangan sosial ekonomi yang kronis dan akumulatif yang di kemas oleh factor-factor etnis dan agama. Begitu juga kerusuhan yang terjadi di ambon di samping factor-factor diatas juga disebabkan oleh adanya perbedaan akses terhadap sumber-sumber daya dan ekonomi (Economic Resources), rekayasa sosial dan perlakuan diskriminatif pemerintah rezim orde3 baru. Kesenjangan sosial ekonomi dan perlakuan diskriminatif telah menyebabkan kelompok tertentu merasa diperas dan dipinggirkan (Being Oppressed and Marginalized) serta di perlakukan tidak adil. Sementara kelompok lain

secara tidak wajar menikmati hak-hak istimewa (Privileges) dan bersikap angkuh dan represif.

Usman Pelly (1999) dengan judul penelitiannya akar Kerusuhan Etnis di Indonesia: Suatu Kajian Awal Konflik dan disintegrasi Nasional di Era Reformasi. Beliau mengatakan bahwa meledaknya kerusuhan etnis di Jakarta menjelang lengsernya Presiden Suharto (Mei 1999) menimbulkan korban baik korban jiwa maupun material. Akar konflik etnik di Jakarta ini di akibatkan oleh kesenjangan Ekonomi dan perlakuan diskriminatif antara kelompok pribumi dan non pribumi (WNI-keturunan Tionghoa), dimana kelompok masyarakat tionghoa di Jakarta yang kaya dan berlagak serba mewah sehingga terkesan sombong dan angkuh. Disamping itu juga keturunan tionghoa ini terkesan terkesan suka pamer kekayaan. Sikap ini mengundang kecemburuan sosial dan mejengkelkan orang banyak.

Kelompok etnik Tionghoa di Jakarta sejak zaman colonial telah di disain untuk menduduki papan

menengah dalam piramida sosial masyarakat Indonesia dan kedudukan structural ini telah di kukuhkan oleh pemerintah rezim Orde Baru, mereka berfungsi sebagai penyangga terhadap kelompok etnis pribumi guna mempertahankan kepentingan politik dan ekonomi rezim yang berkuasa. Oleh karena itu, krisis kepercayaan yang melanda rezim Orba telah menempatkan kelompok etnis keturunan Cina sebagai sasaran tembak keberingasan massa.

Menanggapi dari apa yang telah dikemukakan oleh peneliti sebelumnya tentang konflik etnis terutama yang berkenaan dengan etnis Cina baik di Sambas, ambon, Jakarta dan Selatpanjang dimana tempat penelitian ini berlangsung, akar penebab terjadinya konflik pada masing-masing daerah yang di sebutkan di atas tidak jauh berbeda yakni masalah kesenjangan ekonomi, perbedaan agama dan budaya, perlakuan diskriminatif oleh rezim Orde Baru.

### C. Kerangka Pemikiran

Interaksi sosial adalah hubungan timbale balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun antara kelompok dengan kelompok yang saling mempengaruhi. Suatu interaksi social tidak akan mungkin terjadi apabila tidak ada kontak social dan adanya kontak komunikasi (Soekanto 1990:71)

Dalam proses interaksi social tidak selalu berdampak positif, baik hubungan antar pribadi maupun antar masyarakat, kadang-kadang terjadi pula dampak negative, seperti terjadinya perkehahian, persaingan, kompetisi yang tidak sehat, yang kita namakan konflik. Mengutip apa yang dikatakan Cores (1972) bahwa konflik dapat dijadikan senjata sebagai upaya untuk memperbaiki struktur masyarakat maka konflik dapat bersifat fungsional. Sebaliknya bila konflik itu merusak struktur masyarakat maka konflik itu menjadi fungsional. Maka dari itu, masyarakat harus melihat konflik itu sebagai suatu yang real.

Persoalan konflik di dalam sosiologi dibicarakan dengan dua paradig besar. Pertama, pandangan yang melihat bahwa konflik itu di anggap merusak, oleh sebab itu di hindari. (Pandangan ini berasal dari paradig struktural fungsional), Kedua, pandangan yang melihat bahwa konflik itu ada dalam setiap masyarakat dan fungsional bagi perubahan (Pandangan ini berasal dari paradig konflik).

Asumsi antara tiori konflik ini sangat berlawanan dengan teori fungsional yang mengatakan: setiap masyarakat merupakan suatu struktur elemen yang secara relative mantap dan stabil, dan setiap masyarakat merupakan suatu struktur elemen yang selalu terintegrasi dengan baik (Garna, 1996).

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teori-teori atau paradig konflik. Menurut Dahrendorf (1986) cirri-ciri konflik dalam organisasi social adalah: (1) system social selalu berada dalam keadaan konflik, (2) Konflik tersebut disebabkan karena adanya kepentingan yang bertentangan yang tidak dapat di cegah dalam



struktur social masyarakat, (3) kepentingan itu cenderung berpolarisasi dalam dua kelompok yang saling bertentangan, (4) kepentingan yang saling bertentangan mencerminkan deferensi distribusi kekuasaan di antara kelompok yang berkuasa dan dikuasai, (5) Penjelasan suatu konflik akan menimbulkan perangkat kepentingan baru saling bertentangan, yang dalam kondisi tertentu menimbulkan konflik, (6) perubahan social merupakan akibat konflik tidak dapat di cegah pada berbagai tipe yang telah melembaga.

Kemudian Dahrendorf mengemukakan, setiap masyarakat kapan saja tunduk pada proses perubahan, setiap masyarakat kapan saja memperlihatkan perpecahan dan konflik, setiap elemen dalam suatu masyarakat menyumbang disintegrasi dan perubahan.

Dari teori serta asumsi-asumsi yang dikemukakan diatas, akan penulis gunakan untuk menganalisa bagaimana suatu konflik itu tidak bisa dihindari

dalam suatu masyarakat dan merupakan aspek permanen dalam kehidupan social.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. LATAR, ENTRI, DAN KEHADIRAN PENELITI**

##### **1. Latar Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sawah Brebes, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandarlampung. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada karakteristik yang terdapat di Sawah Brebes, yakni sebagai salah satu daerah di Kota Bandarlampung yang banyak didiami oleh masyarakat kelompok etnik Tionghoa. Dengan luas 46 Ha, Kelurahan Sawah Brebes dihuni oleh 6.874 jiwa dari ,1.667 KK. Dalam catatan sejarah kota Bandarlampung disebutkan bahwa Sawah Brebes didirikan pada tahun 1944 sebagai daerah tujuan bagi kaum pendatang sehingga masyarakatnya bersifat heterogen. Keberagaman kelompok etnik yang mendiami Sawah Brebes selain kelompok etnik tuan rumah Jawa, adalah kelompok etnik Cina. Masyarakat kelompok etnik Tionghoa di Sawah Brebes pada umumnya merupakan etnik peranakan

atau keturunan Tiongkok-Cina yang berasal dari luar Lampung, seperti Tangerang dan Jakarta (lazim disebut Cina Benteng), dan Bangka Belitung (lazim disebut Cina Bangka). Mengingat kedatangan awal mereka terjadi sekitar tahun 1930-an, maka keberadaan mereka saat ini pada dasarnya merupakan etnik keturunan yang lahir dan besar di kelurahan tersebut. Hanya beberapa masyarakat yang benar-benar asli berasal dari Tiongkok atau masih memiliki hubungan dengan tanah asalnya (Tiongkok). Usaha yang mereka lakukan dewasa ini umumnya berdagang, seperti ikan hias, pengusaha toko di pasar Tanjungkarang dan sebagainya.

## **2. Entri Penelitian**

Untuk memperoleh data penelitian tentang Pola Sosial Kelompok Keagamaan Islam dan Kristen di Kelurahan Sawah Brebes Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandarlampung, seperti yang diharapkan dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menghilangkan aspek-aspek formal selama peneliti berinteraksi di tengah-tengah mereka. Dalam hal ini peneliti memanfaatkan posisi rangkap;

sebagai peneliti sekaligus sebagai anggota kelompok etnik Jawa. Dengan demikian peneliti dapat dengan mudah untuk masuk dan mengetahui situasi sosial yang ada, serta memahami komunikasi yang menggunakan bahasa daerah kelompok etnik tersebut. Selanjutnya untuk keperluan izin, penelitian ini telah melalui proses perizinan dari Kantor Lurah.

## **B. ALASAN PENGGUNAAN METODE KUALITATIF**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni pendekatan yang bersandar pada paradigma yang berurusan dengan pemerian dan pemahaman terhadap penemuan gejala-gejala dalam suatu realitas konteks sosial budayanya (empirik). Dengan mengacu kepada paradigma tersebut, maka pengertian tentang konflik dan interaksi (Studi Kasus Pola Interaksi Sosial Kelompok Keagamaan Islam dan Kristen di Kelurahan Sawah Brebes ini sangat relevan dengan bentuk kajian penelitian kualitatif.

## **C. METODE PENGUMPULAN DATA**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode Observasi, Wawancara, dan Studi Dokumentasi.

### **1. Observasi**

Kegiatan observasi dalam penelitian ini dilakukan secara *moderate participant observation*. Artinya keterlibatan peneliti dalam aktivitas subjek penelitian bersifat terbatas. Kegiatan observasi yang peneliti lakukan adalah dengan melihat dan mengamati aktivitas sosial sehari-hari masyarakat di Sawah Brebes.

### **2. Wawancara**

Untuk memperoleh data yang memadai tentang konflik dan interaksi (Studi Kasus Pola Interaksi Sosial Kelompok Keagamaan Islam dan Kristen ini peneliti juga menggunakan metode wawancara. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat, terutama tentang konsep ide, pemikiran yang berkaitan konflik dan interaksi (Studi Kasus Pola Interaksi Sosial Kelompok Keagamaan Islam dan Kristen dengan ataupun sebaliknya. Wawancara yang peneliti lakukan menggunakan teknik wawancara

tidak terstruktur, artinya penulis tidak menggunakan daftar pertanyaan yang telah tersusun, tetapi berdasarkan pertanyaan yang dapat dikembangkan menurut situasi dan kondisi pada saat wawancara berlangsung dengan tetap mengacu kepada topik permasalahan yang dikaji.

### **3. Studi Dokumentasi**

Studi dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan data yang bersifat administratif, geografis, monografi daerah, dan historis Kelurahan Sawah Brebes, serta kondisi sosial budaya yang berkaitan dengan proses Pola Interaksi Sosial Kelompok Keagamaan Islam dan Kristen di Kelurahan Sawah Brebes.

#### **B. Informan**

Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kelurahan Sawah Brebes Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandarlampung. Untuk menghindari pemberian informasi data yang tidak akurat, penulis mensyaratkan informan pada kriteria:

1. Sehat fisik maupun mental.
2. Memahami dengan baik kondisi sosial dan kebudayaan masyarakatnya.

3. Merupakan penduduk Sawah Brebes yang menetap, bukan pendatang yang berpindah-pindah.

informan pertama langsung ditujukan kepada anggota masyarakat Sawah Brebes secara bebas. Inisiatif ini dilakukan mengingat selain keberadaan lurah beserta stafnya merupakan pegawai mutasi yang baru sebulan menjabat dan bekerja di wilayah tersebut, mereka pun bukan penduduk Sawah Brebes. Kemudian dari informan pertama tersebut terus berlanjut ke berbagai informan lainnya sebagaimana teknik sampling bola salju.

Informan kunci atau informan utama dalam penelitian ini adalah Tokoh masyarakat pribumi Sawah Brebes, dan seluk-beluk keberadaan mereka beserta leluhurnya di Sawah Brebes. Informan dari masyarakat pendatang dalam penelitian Ini terdiri dari golongan keluarga yang berbeda, yakni keluarga yang kaya, miskin atau sederhana, lama, baru, asli, dan campuran. Hal ini dengan asumsi bahwa pada masing-masing bentuk keluarga tersebut akan berbeda



perilakunya, sehingga akan berbeda strategi yang ditempuh

#### **E. TEHNIK ANALISIS DATA**

Dalam menganalisis data, penults menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk proses pemilihan, pengeditan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Selanjutnya data yang merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dalam penelitian.

#### **F. TEHNIK PENJAMINAN KEABSAHAN DATA**

Keabsahan data dalam penelitian ini penulis upayakan dengan melakukan:

1. Memperpanjang keikutsertaan peneliti dalam memahami perilaku dan fenomena yang terjadi pada masyarakat di Kelurahan Sawah Brebes. Melakukan triangulasi, yaitu mengecek

keterpercayaan data dengan memanfaatkan sumber-sumber informasi, metode dan teori-teori. Dalam hal ini peneliti melakukan cek silang antar informan dengan mengkonfirmasi hasil temuan untuk mendapatkan kepastian. Selain itu juga dengan memanfaatkan sumber-sumber referensi yang ada.

2. Bertanya dengan rekan-rekan yang topik penelitiannya hampir serupa untuk mendapat masukan yang membantu kesempurnaan penelitian.
3. Melakukan pengecekan data secara teliti.

## **BAB IV**

### **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kondisi Umum Sawah Brebes**

##### **1. Asal-Usul Sawah Brebes**

Pada awalnya Desa/Kelurahan Sawah Brebes adalah sebuah pendukuhan dari Desa Sukajawa yang sekarang ini berada dalam wilayah Kecamatan Tanjung Karang Barat. Pada tahun 1946 karena pendukuhan ini telah memiliki penduduk yang cukup banyak maka dikembangkan menjadi desa tersendiri yang diberi nama Desa Sawah Ketoprak (karena penduduknya banyak yang menggemari kesenian ketoprak) dengan kepala desa yang dijabat oleh kepala suku waktu itu, yaitu Bapak Tirtomedjo.

Nama desa Sawah Ketoprak tidak berlangsung lama, karena penduduknya berasal dari Brebes Tegal Jawa Tengah maka pada tahun 1946 nama Desa Sawah Ketoprak diganti menjadi Desa Sawah Brebes dengan Kepala Desa yang definitif yaitu Bapak Tirtomedjo dengan luas wilayah termasuk daerah Gunung Sari ( batas kantor Kelurahan Gunung Sari

sekarang). Karena perkembangan penduduk dan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan maka pada tahun 1958 sebagian wilayah desa Sawah Brebes di mekarkan menjadi desa tersendiri yaitu desa Sawah Lama dengan kepala desa Hi. M. Amin Zahrie. Desa Sawah Ketoprak yang kemudian diubah menjadi desa Sawah Brebes dan berubah status menjadi Kelurahan Sawah Brebes sampai dengan sekarang telah beberapa kali mengalami pergantian pimpinan baik yang berstatus sebagai Kepala Desa maupun berstatus sebagai Lurah sampai sekarang

## **2. Letak, Luas, dan Jumlah Penduduk**

Kelurahan Sawah Brebes berada dalam kawasan Kota Bandarlampung, Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Jagabaya I, sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sawah Lama, T. Agung dan Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Tanjungkarang Pusat, sebelah Barat Jalan Teuku Umar, Sebelah Timur Way Awi (Kelurahan Kedamaian dan Kelurahan Jagabaya II). Kelurahan ini memiliki luas wilayah 46 Ha. Berada di

ketinggian tanah dari permukaan laut 96M. Kelurahan Sawah Brebes saat ini dihuni oleh 6.874 jiwa dari 1.667 KK dengan perincian 3.368 laki-laki dan 3.486 perempuan.

### **3. Mata Pencarian, Agama, dan Pendidikan**

#### **a. Mata Pencarian**

Kondisi umum kehidupan sosial masyarakat Sawah Brebes hingga kini masih berciri khas sebagai masyarakat kawasan di tengah pusat kota, yakni bersifat mobile dengan segala aktivitasnya, yakni pedagang, buruh, PNS, dan wiraswasta usaha rumahan. Masyarakat kelompok etnik Jawa sebagai kelompok etnik tuan rumah lebih dominan menjalankan perekonomian di bidang industri rumahan seperti pembuat tempe, tahu, makanan kuliner seperti bakso dan mie ayam.

Bidang usaha lainnya yang digeluti adalah sebagai buruh dan tukang bangunan, PNS, pensiunan, dan usaha meubel. Jenis usaha rumahan yang khas pada masyarakat etnik Jawa

di kelurahan Sawah Brebes adalah pembuatan seni kerajinan dan alat rumah tangga berbahan gerabah.

Tabel 1. Jenis Mata Pencarian Masyarakat Sawah Brebes Berdasarkan Pekerjaan

<b>Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>
PNS	255
ABRI	17
Buruh	1.375
Wiraswasta/Dagang	411
Pertukangan	263
Pensiunan	382

Sumber : Monografi Kelurahan Sawah Brebes Tahun 2011

**b. Agama**

Sebagian besar masyarakat Sawah Brebes yakni 90% merupakan pemeluk agama Islam. Sedangkan yang lainnya menganut agama lain seperti Kristen

dan Budha Konghucu. Penganut agama ini adalah masyarakat dari kelompok etnik Tionghoa. Agama Kong hu cu bagi masyarakat kelompok etnik Tionghoa di Sawah Brebes bukan merupakan agama yang baru mereka kenal. Pada umumnya mereka telah memeluk Kong hu cu sebelum mereka datang ke Sawah Brebes. Suasana keberagama-an antar umat beragama maupun antar umat seagama di Sawah Brebes di tengah

### **c. Pendidikan**

Dalam dunia pendidikan, masyarakat Sawah Brebes termasuk memiliki kepedulian yang tinggi. Telah banyak keluarga yang anggota keluarganya atau anaknya berpendidikan tinggi. Kepedulian mereka terhadap pendidikan dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan tuntutan masa depan yang penuh persaingan dan posisi geografis di pusat ibu kota provinsi.

Kondisi lingkungan Sawah Brebes sebagai lokasi di pusat kota tampaknya telah mempengaruhi masyarakatnya untuk lebih mementing-kan bagaimana caranya mereka dapat ikut terjun dalam

dunia perekonomian secepatnya, dan itu tidak perlu diperoleh melalui pendidikan yang tinggi, lama dan mahal. Pendidikan tinggi identik dengan pekerjaan menjadi pegawai atau PNS, sedangkan pasar tidak membutuh-kan pendidikan tinggi, melainkan kemampuan berusaha dan berdagang. Keengganan dan ketidakmampuan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan juga disebabkan oleh faktor ekonomi.

Kondisi tersebut bukan merupakan bentuk kepasrahan dalam hidup dan tergantung pada nasib, tetapi lebih tepat sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi kehidupan (adaptasi) sesuai dengan kemampuan. Bagaimanapun keadaannya mereka telah berusaha dan harus dihargai semua pengorbanan atas tanggung jawabnya terhadap pendidikan anak-anak mereka. Hal ini lebih berharga daripada sekedar kepasrahan terhadap hidup dengan menyerahkan semuanya kepada nasib.

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Sawah Brebes

Pendidikan	Jumlah
------------	--------



TK	422
SD	2.347
SMP	1.854
SMU	1.745
Diploma 3	420
Sarjana	367

Sumber : Monografi Kelurahan Sawah Brebes  
Tahun 2011

#### **4. Bahasa dan Budaya**

Bahasa yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Sawah Brebes pada umumnya adalah bahasa Indonesia. Bahasa daerah yang masih banyak digunakan masyarakat adalah bahasa Jawa, yakni bahasa Jawa Ngoko yang cenderung kasar. Hanya beberapa orang dari keluarga tertentu yang menguasai bahasa Jawa Kromo dan Kromo Inggil. Penggunaan bahasa Jawa saat ini sudah berkurang sehingga identik dengan masyarakat lama atau golongan tua.

Kedudukan bahasa Jawa di Sawah Brebes sebagaimana umumnya di Lampung sangat kokoh

dan terjaga oleh masyarakat pemakainya (etnik Jawa). Hal ini terlihat dari kecenderungan masyarakat menggunakannya dalam hampir segala situasi sehari-hari baik dengan sesama etnik Jawa maupun dengan etnik pendatang.

Kebudayaan yang berkembang di Sawah Brebes adalah sebagaimana kebudayaan yang ada di Kota Bandar-lampung pada umumnya, yakni sebagai hasil kolaborasi kebudayaan dari berbagai unsur etnik yang ada di Kota Bandarlampung.

## **5. Sarana Pendukung**

Sebagai pendukung bagi berlangsungnya kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakatnya, Kelurahan Sawah Brebes memiliki sarana seperti terangkum dalam tabel 3.

Tabel 3. Sarana Umum Masyarakat Sawah Brebes

<b>Sarana</b>	<b>Jumlah</b>
<b>SD</b>	4
Masjid/Muhsola	9
Gereja	1
Puskesmas	1
Lapangan Bulutangkis	1
Lapangan Tenis Meja	1
Lapangan Sepak Bola	1
Warung	42
Toko	3

Sumber: Monografi Keturahan Sawah Brebes Tahun 2011

## **B. Bentuk-bentuk Konflik**

### **a. Konflik kelompok**

Interaksi antara warga pada awalnya berjalan lancar. Konflik yang terjadi kelurahan Sawah brebes adalah konflik kelompok keagamaan Islam (umat Islam) dan keagaan Kristen Katolik (umat Kristen Katolik).Perikaian antara kedua kelompok keagamaan tersebut muncul

keperluan ketika umat Kristen Katolik mengalihfungsikan rumah tempat tinggal menjadi tempat ibadah (gereja sehingga meresahkan masyarakat yang ada di sekitarnya yang Islam. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh informan Islam sebagai berikut:

Konflik antara kelompok keagamaan Islam dan Kristen Katolik di kelurahan Sawah brebes, pertama adanya peralihan fungsi, rumah biasa dirombak menjadi rumah ibadah, padahal dalam izin pendirian rumah tempat tinggal. Pendirian rumah ibadah tersebut harus berdasarkan pada izin masyarakat setempat melalui RT, RW, Lurah, Camat kemudian meneruskannya ke Pemerintahan Daerah Tingkat II Kota Bandarlampung. Atas peretujuan Pemda, Kementerian Agama dan Dinas Tata kota barulah izin itu di keluarkan, jadi tidak mudah pendiriannya. Tambah lagi ada indikasi dalam menjalankan misinyaa (Kristen Katolik) mereka menggunakan materi dan aktivitas ibadah mereka mengganggu ketenangan masyarakat dengan bergitar-gitar sampai larut malam.

Tanggapan terhadap pengalihan fungsi rumah tempat tinggal menjadi tempat ibadah (Gereja Katolik) tidak seharusnya menimbulkan konflik atau pelarangan, sebagaimana yang di ungkapkan

oleh seorang informan Kristen Katolik sebagai berikut:

Kami pihak Katolik menjadikan rumah tempat tinggal yang ada di kelurahan Sawah Brebes tersebut menjadi rumah ibadah bukan bermaksud untuk memicu konflik dengan masyarakat Sawah Brebes yang Islam, itu hanya merupakan ungkapan imankami kepada tuhan yang membutuhkan rumah ibadah, kami tidak tega melihat orang tua-tua kami beribadah jauh-jauh, bukankah Negara ini berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, ketika peneliti menanyakan apakah sudah pernah diajukan permohonan supaya didirikan Gereja di Sawah Brebes ini? Informan menjawab dulu-dulunya sudah tetapi tidak pernah di gubris. Kalau memang tidak boleh rumah tempat tinggal dijadikan rumah ibadah, permudah kami dalam mendirikannya jangan dipersulit.

Dalam serangannya terhadap umat Islam, kelompok keagamaan Kristen Katolik mengkritik penggunaan alat pengeras suara yang ada di mesjid atau di mushalla, karena mengganggu ketentrman tidur mereka, seorang informan Krieten Katolik menanggapi sebagai berikut:

Pada suatu ketika saya sangat mengantuk sekali tiba-tiba ada bunyi kaset membaca Al-Quran dengan suara yang sangat keras, sehingga saya tidak jadi tidur padahal itu jam-jam tidur, saya

rasa ada aturan penggunaan alat pengeras suara tersebut yang tidak di bunyikan di waktu tidur, sedang beribadah atau melakukan upacara, menurut saudara apakah pihak Mesjid atau Mushalla mengindahkan peraturan ini, apakah ini juga tidak melanggar aturan.

Dari ungkapan informan diatas dapat dipahami, bahwa konflik kelompok yang terjadi antara umat Islam dan Kristen Katolik di Kelurahan Sawah Brebes di sebabkan oleh karena masing-masing umat beragama tersebut kurang mematuhi aturan mengenai misi dan dakwah sebagai norma dalam pengembangan agama. Mengalih fungsikan rumah tempat tinggal menjadi tempat ibadah (gereja) dan membunyikan alat pengeras suara di luar batas control di mesjid-mesjid dan musholla merupakan implikasi semua ini.

Dahrendorf (dalam buku Usman Pelly, 1994:61) mengatakan: Konflik bias terjadi jika masing-masing kelompok meletakkan kepentingan kelompok mereka di atas konsesus social (norma social).

## b. Konflik Realistik

Konflik yang terjadi antara umat Islam dan Kristen Katolik di kelurahan Sawah Brebes bertujuan untuk pencapaian tujuan pengembangan agama masing-masing (Islam dan Kristen Katolik) atau yang sering dikenal dalam terminology agama dengan persaingan dalam misi dan dakwah dari kedua kelompok keagamaan tersebut telah berimplikasi kepada pengembangan agama. Umat Islam menuding umat Kristen Katolik telah melanggar aturan misi dan dakwah, Karen mereka telah mejadikan rumah tempat tinggal menjadi rumah ibadah (gereja) yang letaknya di tengah-tengah masyarakat Islam, sebaliknya umat Kristen Katolik bertahan dengan pendiriannya mereka bahwa hak pelaksanaan ibadah oleh pemeluk agama masing-masing di jamin oleh undang-undang, sebagaimana yang di ungkapkan oleh seorang informan Islam sebagai berikut:

Pengalih fungsian rumah tempat tinggal menjadi rumah ibadah, apalagi letaknya di tengah-tengah pemukiman umat Islam merupakan pelanggaran terhadap aturan tentang misi dan dakwah, sebab di samping akan mengganggu ketentraman warga yang ada di lingkungan Sawah Brebes yang

mayoritas Islam dimana rumah yang di jadikan gereja tersebut dapat juga izin pendirian rumah ibadah tidak sama dengan pendirian rumah tempat tinggal, pendirian rumah tempat tinggal tidak memerlukan izin dari masyarakat setempat sedangkan pendirian rumah ibadah sangat perlu dengan persetujuan masyarakat setempat.

Seorang Informan Kristen Katolik menanggapi hal di atas sebagai berikut:

Pengalih fungsian rumah tinggal menjadi tempat ibadah (gereja) yang kami (umat Kristen Katolik) lakukan tidak seharusnya di permasalahan, sebab Negara kita berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Negara menjamin kemerdekaan bagi pemeluk agama untuk menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing, tambahan lagi kami membutuhkan tempat ibadah sebagai wadah pembinaan Umat apalagi umat Katolik yang ada di Sawah Brebes.

Ungkapan informan di atas dapat dipahami, bahwa konflik realistik yang terjadi antara umat Islam dan Kristen Katolik di kelurahan Sawah Brebes lebih banyak di sebabkan oleh masing-masing mereka menganggap bahwa prosedur yang mereka tempuh dalam pembinaan dan pengembangan agama adalah benar.



Coser (dalam Sarifuddin, 1986:64) mengatakan: konflik bias terjadi jika suatu kelompok social ingin mencapai tujuan yang dicita-citakannya sedangkan pada sisi lain ada kelompok yang menentanginya. Pada tataran ini konflik merupakan alat untuk mencapai tujuan.

### C. Bentuk-bentuk integrasi sosial

Ada dua bentuk integrasi social yang terjadi di Kelurahan Sawah brebes yaitu: gotong royong dan saling menghormati antar pemeluk agama.

#### a. Gotong-royaong.

Gotong royong merupakan bentuk dari kerja sama, sedangkan kerjasama adalah bentuk masyarakat yang terintegrasi. Di kelurahan Sawah Brebes, gotong-royong tersebut merupakan program kelurahan yang dilaksanakan dua kali dalam satu bulan. Gotong-royong merupakan wadah perekat sosial bagi masyarakat kelurahan Sawah Brebes yang multi etnik dan agama Goro bersama telah berfungsi dengan baik merelatifkan perbedaan golongan social, terutama antara umat Islam dan Kristen Katolik di kelurahan Sawah Brebes. Hal ini

jelas terungkap dari pernyataan seorang informan Kristen Katolik sebagai berikut:

Goro bersama itu bukan sekedar kerja sama dalam membersihkan lingkungan, tetapi yang lebih penting disana adalah pertemuan orang dengan berbagai latar belakang agama dan budaya yang masing-masing, tak terkecualikan umat Islam dan Kristen Katolik. Dari pertemuan tersebut tercipta interaksi dan komunikasi social untuk membicarakan masalah-masalah kehidupan, karena sehari-hari kita bekerja mencari hidup, pergi pagi pulang sore tidak saling bertemu. Dari pertemuan dan komunikasi tersebut akan tercipta saling hormat-menghormati dan memahami persamaan dan perbedaan.

Dari ungkapan informan di atas dapat dipahami, bahwa di kelurahan Sawah Brebes gotong-royong yang sudah merupakan program kelurahan tersebut telah ikut berperan sebagai alat peredam konflik antara umat Islam dan Kristen Katolik, sebab dalam gotong-royong tersebut tercipta pertemuan dan komunikasi social dan sikap saling mau memahami perbedaan sehingga terwujud kerjasama yang baik.

Hasibullah Mursyid (1978:203) mengatakan: dalam rangka meningkatkan hubungan social yang baik, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan

Mahasiswa Katolik Indonesia (GMKI) telah melaksanakan bakti social di desa Aek Habil dan desa Pancuran Dewa di Sibolga.

b.Saling Hormat menghormati

Sikap saling hormat menghormati yang merupakan sikap dari masyarakat yang terintegrasi di kelurahan Sawah Brebes terwujud dalam bentuk saling kunjung mengunjungi di waktu hari-hari besar agama (Islam dan Kristen Katolik) dan dalam acara lain seperti pesta perkawinan, kematian dan lain-lain. Hal ini jelas dari ungkapan seorang Islam sebagai berikut:

Saling hormat menghormati antara umat Islam dan Kristen Katolik di kelurahan Sawah Brebes tercipta melalui saling hadir dalam undangan kedua belah pihak.

Dalam hal saling hormat-menghormat ini seorang informan Kristen Katolik menyatakan sebagai berikut:

Pewujudan dari sikap hormat umat Kristen Katolik terhadap umat Islam terjadi ketika hari raya Idul Fitri dimana saya misalnya yang katolik mengunjungi rumah tangga saya yang beragama Islam untuk mengucapkan selamat lebaran, begitu

pula sebaliknya mereka datang pada waktu natalan. Pada waktu puasa juga kami tidak mau makan-makan di hadapan mereka yang berpuasa.

Dari ungkapan informan di atas dapat dipahami, bahwa sikap saling hormat-menghormati yang di refleksikan melalui saling kunjung mengunjungi pada hari-hari besar agama (Islam dan Krieten Katolik) di kelurahan Sawah Brebes telah berperan merelatifkan sikap saling curiga-mencurigai yang merupakan sumber konflik sehingga tercipta integrasi social.

Hendropuspito (1993:179) mengatakan: rasa saling hormat menghormati mencakup juga perhatian yang halus terhadap hati nurani dan keyakinan pihak lain, sampai pada kesukaran-kesukaran, dan kekaguman akan kemajuannya, menjauhkan perbandingan kekuatan tradisi masing-masing yang dapat menimbulkan sakit hati dengan mencari kelemahan pada tradisi keagamaan lain, atau membandingkancita-cita dari suatu pihak dengankenyataan pihak lain bias menciptakan sikap rukun antar umat beragama.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai: Konflik dan Interaksi social Studi Kasus Pola Interaksi Sosial Kelompok Keagamaan Islam dan Kristen di Kelurahan Sawah Brebes Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandarlampung, maka dapat di tarik kesimpulan:

1. Konflik yang terjadi antara umat Islam dan Kristen Katolik di kelurahan Sawah Brebes di sebabkan oleh masing-masing dari kedua umat tersebut tidak mematuhi aturan mengenai misi dan dakwah yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan agama.
2. Konflik kelompok dan konflik realistic merupakan bentuk-bentuk konflik social yang terjadi di kelurahan sawah Brebes
3. Integrasi yang terjadi antara umat Islam dan Kristen Katolik di kelurahan Sawah Brebes lebih banyak di dorong oleh masing-masing mereka

memiliki kepentingan yang sama dalam kehidupan social, seperti saling ketergantungan yang merefleksi melalui sikap saling menghormati yang terwujud melalui saling kunjung mengunjungi pada hari-hari besar agama.

4. Integrasi social yang terjadi antara umat Islam dan Kristen Katolik belum lagi berbasis institusi agama yang bersangkutan karena agama sangat sensitive dengan keberadaan doktrin nilai yang dimilikinya.

## B. Saran

Sesuai dengan temuan-temuan dalam penelitian Konflik dan Interaksi social Studi Kasus Pola Interaksi Sosial Kelompok Keagamaan Islam dan Kristen di Kelurahan Sawah Brebes Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandarlampung, maka penulis perlumenyarankan beberapa hal:

1. Setiap penganut agama, khususnya Islam dan Kristen Katolik di kelurahan Sawah Brebes agar mematuhi aturan hokum mengenai misi dan dakwah

dalam pembinaan dan pengembangan agama masing-masing supaya tercipta keteraturan social.

1. Setiap penganut agama khususnya Islam dan Kristen Katolik agar sering melaksanakan dialog antar umat beragama sehingga timbul sikap saling hormat-menghormati untuk menghindari sikap curiga mencurigai.
2. Agar pemerintah menciptakan atau menciptakan atau mengefektifkan kegiatan-kegiatan yang melibatkan kedua belah pihak yang bertikai (Islam dan Kristen Katolik) seperti bakti social dan lain-lain sebagai alat peredam konflik.
3. Pemerintah di harapkan bias mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan kedua umat beragama (Islam dan Kristen Katolik) di kelurahan Sawah Brebes agar tidak terjadi ketidak adilan dalam pendistribusian otoritas dalam usaha pembinaan dan pengembangan agama.

## DAFTAR PUSTAKA

Alqadrie, Ibrahim, Syarif (1999) : Konflik Etnis di Ambon dan Sambas: Suatu Tinjauan Sosiologis (dalam antropologi Indonesia, Th, XXIII No. 58

Berry, David (1983): Teori-Teori Sosial Modern dari Persons sampai Hebermas, Jakarta:Rajawali

Dahrendorf, Ralf (1986): Konflik dan konflik Dalam Masyarakat Industri Sebuah Analisa Kritis, Jakarta:Rajawali

Johnson, Paul, Doyle (1986): Teori Sosiologi Klasik dan Modern (terjemahan) Jakarta:Gramedia

Keesing, M. Reger (1992): Antropologi Budaya Perspektif Kontempores, Jakarta:Erlangga

Homby, AS. 1995. Oxford Advanceced Learner' s Dictionry Of Current English, New York: Oxford University Press.



Kahmad, Dadang (2000): Sosiologi Agama, Bandung: Rosda

Kuntowijoyo (2000): Dimensi Kultural Integrasi Bangsa (dalam Republika, 15 Desember 2000)

Pelly, Usman (1994): Teori-Teori sosial Budaya, Jakarta: P & K

----- (1999): Akar Kerusuhan di Indonesia: Suatu Kajian Awal Konflik dan Disintegrasi Nasional (dalam antropologi Indonesia, th XXIII.No.58)

Poloma M. Margaret (2000): Sosiologi Kontemporer, Jakarta:Rajawali

Soemardjan, Selo (2001): Konflik Antar Suku di Indonesia (dalam kompas, Kamis 23 Maret 2001

Suparlan, Parsudi (1999): Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya (dalam antropologi Indonesia, Th,XXIII, No.58

Soekanto, Soejono (1985): Karl Mannhim, Sosiologi sistemtis, Jakarta: Rajawali

----- (1983): Kamus Sosiologi, Jakarta : Rajawali

Syaifuddin, Fedyani, Achmad (1986): Konflik dan Integrasi  
Perbedaan Fahaman dalam Agama Islam, Jakarta: Rajawali

Salam, Alfitra, Melayunisasi (dalam tempo, 25 Mei 2001)

Taneko, G. Saleman (1990): Struktur dan Proses Sosial  
Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan, Jakarta:Rajawali

